



P U T U S A N

Nomor 39 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA, Pekerjaan Advokat & Pengacara, beralamat di Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, SH, MH, Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **S. JOSEPHINE M. WIWIEK WIDWIJANTI**, beralamat di Jl. Nandan RT. 007/RW. 039, Sariharjo, Ngaglik-Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF, Lestari, S.H, Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.M, Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Weko Darmawan, SH.MT, Mulyanto, S.H, Herman Butar Butar, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Hendra Kurniawan S. W., S.H., Lilis Nur Faizah, S.H., Natalya Manna Theresia, S.H., Rio Nugraha Pratama, SH, Rani Gayatri, S.H., Ni Putu Rossica Sari, SH., Kesemuanya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok , Sleman Yogyakarta 55282, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016, dan surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 05/09/2016, Nomor : 144/SK/Pdt/PN.Btl;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

2. **C. SUJIATMOKO**, beralamat di Karang Nangka, RT. 03/RW. 19 No. 363 B, Gamping-Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF, Lestari, S.H, Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.M, Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Weko Darmawan, SH.MT, Mulyanto, S.H, Herman Butar Butar, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., Vinna Dien

Hal 1 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Asmady Putri, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Hendra Kurniawan S. W., S.H., Lilis Nur Faizah, S.H., Natalya Manna Theresia, S.H., Rio Nugraha Pratama, SH, Rani Gayatri, S.H., Suharmoko, SH., Dudy Satriya Widjana, Widyanti Septa Puspita sari, SH., Kesemuanya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok , Sleman Yogyakarta 55282. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016, dan surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 13/09/2016, Nomor : 157/SK.Pdt/2016/PN.Btl;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

- 3. DAMARIS HESTANTI THOMAS**, beralamat di Jl. Sambi Legi RT. 007/RW. 55 No. 49, Sleman. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF, Lestari, S.H, Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.M, Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Weko Darmawan, SH.MT, Mulyanto, S.H, Herman Butar Butar, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Hendra Kurniawan S. W., S.H., Lilis Nur Faizah, S.H., Natalya Manna Theresia, S.H., Rio Nugraha Pratama, SH, Suharmoko, SH, Rani Gayatri, S.H., Rina Mawarti, SH., Martha Noviaditya, SH., Herman Abdurrahman, SH. Kesemuanya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok , Sleman Yogyakarta 55282, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016, dan surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 05/09/2016, Nomor : 145/SK.Pdt/IX/PN.Btl;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

- 4. BAYU ARISTA PUTRA**, beralamat di Jl. Manding Kidul RT. 07, Kelurahan Trirenggo, Bantul. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF, Lestari, S.H, Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.M, Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Mulyanto, S.H., Herman Butar Butar, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Hendra Kurniawan S. W., S.H., Lilis Nur Faizah, S.H., Natalya Manna Theresia, S.H., Rio Nugraha Pratama., Rani Gayatri, SH., Suharmoko, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 12 Agustus 2016,

Hal 2 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



dan surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 05/09/2016, Nomor : 146/SK.Pdt/IX/PN.Btl,;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

5. **ANI ASHARIDA**, beralamat di Jl. Dayu RT. 01 no. 11 Gading Sari, Sanden, Bantul. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF, Lestari, S.H, Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.M, Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Mulyanto, S.H, Herman Butar Butar, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Hendra Kurniawan S. W., S.H., Lilis Nur Faizah, S.H., Natalya Manna Theresia, S.H., Rio Nugraha Pratama, SH, Rani Gayatri, S.H., Suharmoko, SH., Kesemuanya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok , Sleman Yogyakarta 55282. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016, dan surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 05/09/2016, Nomor : 147/SK.Pdt/IX/PN.Btl,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

6. **SITI NUR WIDOWATI**, beralamat di Perumahan Palem Hijau No. 123, Godean KM 7, Sidomoyo-Godean, Bantul. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF, Lestari, S.H, Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.M, Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., R. Giat Sutono, SH, MM, Mulyanto, S.H, Herman Butar Butar, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Hendra Kurniawan S. W., S.H., Lilis Nur Faizah, S.H., Natalya Manna Theresia, S.H., Rio Nugraha Pratama, SH, Rani Gayatri, S.H., Suharmoko, SH., Andri Andreas Manurung, SH., Dinda Sekar Arum, SH. Kesemuanya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok , Sleman Yogyakarta 55282. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016, dan surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 05/09/2016, Nomor : 148/SK.Pdt/IX/PN.Btl,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.



7. **FITRA JATI KUSUMA**, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF, Lestari, S.H, Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.M, Mulyana, S.H., M.H, Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H., Mulyanto, S.H, Herman Butar Butar, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., Vinna Dien Asmady Putri, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Hendra Kurniawan S. W., S.H., Lilis Nur Faizah, S.H., Natalya Manna Theresia, S.H., Rio Nugraha Pratama, SH, Rani Gayatri, S.H., Suharmoko, SH., Kesemuanya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, menggunakan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta beralamat di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo, Depok , Sleman Yogyakarta 55282. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2016, dan surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 05/09/2016, Nomor : 149/SK.Pdt/IX/PN.Btl,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

Untuk selanjutnya **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VII** akan disebut sebagai **PARA TERGUGAT**. Adapun para Kuasa **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VII** selanjutnya disebut sebagai : **KUASA PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register No. 39 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl tanggal 20 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Advokat dan Pengacara, Kurator-Pengurus, Mediator, Legal Auditor dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang berpraktek sebagai Pengacara sejak tahun 1986 (Bukti P-1), selanjutnya diangkat berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yaitu berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.PANKUM 143.671.1990 tanggal 6 Maret 1990 (Bukti P-2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. D.29 KP 04.13 tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993 (Bukti P-3) dan telah menjalankan tugas profesinya sejak dilantik dan diangkat sumpah hingga saat ini sebagai Advokat & Pengacara untuk memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam menjalankan tugas profesi

Hal 4 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



tidak pernah membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, pilihan politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (vide pasal 18 Undang-undang No. 16 Tahun 2003 tentang Advokat);

2. Bahwa Penggugat sebagai Advokat & Pengacara yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki spesialisasi tambahan sebagai Advokat yaitu:

1. Sebagai Kurator & Pengurus yang diangkat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P-4);
2. Sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-5);
3. Sebagai Mediator Bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan No. 00006/PPM.A.6/FH.UNTAR/IV/2010 tanggal 17 April 2010 (Bukti P-6);
4. Sebagai Legal Auditor berdasarkan Keputusan Certified Legal Auditor (CLA) tanggal 2 Juli 2014 (Bukti P-7);

3. Bahwa Penggugat dalam menjalankan profesinya, pada tanggal 25 Februari 2015 mendapat seorang Klien yang bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, beralamat di Taman Griya Indah IV/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dalam permasalahan pemeriksaan kepatuhan pajak selaku Pribadi sehingga Klien Penggugat mendapat Surat Panggilan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menjalani pemeriksaan Pajak dalam hal kepatuhan selaku Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bantul (KPP Bantul);

4. Bahwa sehubungan dengan permasalahan Klien Penggugat tersebut di atas (Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini), maka Penggugat diberi Surat Kuasa (Bukti P-8) untuk mewakili/mendampingi Klien tersebut, sehubungan dengan proses hukum yang dihadapi oleh Klien Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Klien Penggugat tersebut, Penggugat telah menyurati Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 28 Februari 2015 (Bukti P-9) yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan cara kerja KPP Bantul, dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang memperlakukan Klien Penggugat dengan tidak adil.

Bahwa dalam Surat Keberatan tersebut Penggugat menyampaikan antara lain:

- 4.1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan Surat No. 00014/WPJ23/KP0505/RIKSIS/2015 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul-S. Josephine M. Widwijanti – NIP. 196803221995032001 (Tergugat I) telah memerintahkan:

Hal 5 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



1. C. Sujatmoko- NIP 196508301985031001 (Tergugat II);
2. Damaris HT-NIP 197701311996032001 (Tergugat III);
3. Bayu Arista Putra–NIP. 198404172006021001 (Tergugat IV);
4. Ani Asharida–NIP. 198909062010122002 (Tergugat V);
5. Siti Nur Widowati-NIP. 197305061993022001 (Tergugat VI);
6. Fitra Jati Kusumo-NIP. 198506162007011001 (Tergugat VII);

untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Klien Penggugat, tetapi pada waktu itu Klien Penggugat sedang tidak berada di Yogyakarta dan baru pada tanggal 21 Februari 2015 Klien Penggugat berada di Yogyakarta.

- 4.2. Bahwa selama Klien Penggugat sedang tidak berada di Yogyakarta, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII selalu mendatangi kediaman Klien Penggugat dan kantornya seolah-olah tidak percaya bahwa Klien Penggugat berada di luar kota;
- 4.3. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2015 saat Klien Penggugat berada di Yogyakarta, sekembali dari luar kota Tergugat II sampai dengan Tergugat VII setiap saat tanpa mengenal waktu selalu menelpon Klien Penggugat untuk bertemu dan terakhir pada tanggal 26 Februari 2015 Tergugat II sampai dengan Tergugat VII pagi-pagi mendatangi kediaman Klien Penggugat, namun tidak bertemu sehingga mendatangi juga kantor Klien Penggugat dan menunggu selama jam kerja;
- 4.4. Bahwa adapun maksud Tergugat I pada waktu itu selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan dengan antara lain meminta diperlihatkan atau dipinjamkan buku dan dokumen berupa :
 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP;
 2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2;
 3. Rekening Koran bank, buku tabungan;
 4. Perjanjian kontrak kerja;
 5. Bukti kepemilikan harta;
 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport;
 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta (formulir terlampir);
 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir);

Hal 6 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir);
 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir);
 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan (Bukti P-10).
- 4.5. Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Bantul (Tergugat I) tujuannya untuk pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011, namun Tergugat II sampai dengan Tergugat VII pun meminta SPT Tahunan tahun 2010, SPT Tahun 2012 yang terkesan hanya mencari-cari kesalahan saja;
- 4.6. Bahwa apabila maksud dan tujuan yang baik dari KPP Pratama Bantul (Tergugat I dan Tergugat-tergugat lainnya) untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan, maka apabila bertujuan untuk menguji kepatuhan SPT Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012, maka seharusnya Tergugat II sampai dengan Tergugat VII menjelaskan melalui surat yang mengindikasikan berdasarkan data-data yang pernah dilaporkan bahwa Klien Penggugat selaku Wajib Pajak Pribadi diduga tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban Pajak;
- 4.7. Bahwa cara-cara kerja Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang tidak mengenal lelah mengejar kepatuhan Klien Penggugat sebagai Wajib Pajak Pribadi perlu dipertanyakan karena apakah terhadap semua Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
5. Bahwa dalam Surat Keberatan Penggugat tanggal 28 Februari 2015 (**Vide Bukti P-9**) tersebut diikuti dengan pertemuan dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 16 Maret 2015 di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mempertanyakan legalitas Penggugat dan pada saat itu Penggugat menyerahkan legalitas berupa Surat Kuasa dari Klien Penggugat dan selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-11) dan pada waktu itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak menolak kehadiran Penggugat sehingga dalam pertemuan tersebut membicarakan materi perkara yang berkaitan dengan Klien Penggugat yaitu tentang Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi;



Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan Klien Penggugat adalah untuk menguji kepatuhan Pajak dan sifatnya random, acak sehingga pada waktu itu (tanggal 16 Maret 2015) Penggugat menanyakan apakah ada bukti-bukti permulaan yang mengarah dalam hal-hal yang dapat dikategorikan bahwa Klien Penggugat tidak patuh dalam hal Pajak Pribadi dan apabila sifatnya hanya random, acak maka tidak ada keharusan pemeriksaan terhadap Klien Penggugat;

6. Bahwa setelah pertemuan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 16 Maret 2015 di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ternyata pada tanggal 24 Maret 2015 Klien Penggugat dipanggil oleh Rudi Gunawan Bastari-Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membicarakan permasalahan Klien Penggugat dan pada waktu itu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang juga hadir di ruang kerja Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan kepada Klien Penggugat agar tidak memakai jasa hukum Penggugat dan diinformasikan pula bahwa pemeriksaan kepatuhan Klien Penggugat selaku Wajib Pajak Pribadi karena ada pengaduan dari seseorang, tetapi tidak disebutkan siapa yang mengadukan Klien Penggugat;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam butir 6 tersebut di ruang kerja Rudi Gunawan Bastari – Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 27 Maret 2015 dengan No. 007/PPB/PBP/II/2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan cara kerja Staf KPP Bantul dan pemanggilan Klien Penggugat ke Kanwil Pajak Yogyakarta (Bukti P-12);
8. Bahwa dalam Surat Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 27 Maret 2015 (Vide Bukti P-12) Penggugat telah menyampaikan antara lain :

1. Tentang Legalitas Kuasa Hukum

Dalam pemeriksaan dan dialog selama rapat di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII antara lain Tergugat I mempersoalkan tentang kehadiran Penggugat yang dikatakan tidak dapat mewakili Wajib Pajak karena bukan sebagai Konsultan Pajak.

Pada waktu itu Penggugat menyerahkan Kartu Izin Praktek dari Pengadilan Pajak selaku Kuasa Hukum dan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

Hal 8 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Untuk Legalitas Penggugat pada waktu itu Tergugat I menyatakan akan berkonsultasi lagi dengan Pimpinannya dan akan mengabari Penggugat, namun nyatanya tidak pernah dikabari, tetapi Klien Penggugat malah dipanggil oleh Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan meminta supaya Klien Penggugat tidak memakai Penggugat sebagai Konsultan Hukumnya. Bahwa penolakkan kehadiran Penggugat untuk menangani permasalahan Klien Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I beserta Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan juga Kakanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah jelas melanggar Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimana Penggugat sebagai Advokat yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berpraktek sebagai Advokat sejak tahun 1986 hingga kini, **dimana dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Ayat 2 yang menyatakan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.**

Bahwa semua persyaratan sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah Penggugat penuhi sehingga tidak ada alasan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menolak Penggugat menjalankan profesinya (Bukti P-12).

2. Tentang Materi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

Tentang Materi dan tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Pribadi sehingga pada waktu itu Penggugat mempertanyakan dalam hal apa Klien Penggugat dianggap tidak patuh karena berdasarkan laporan-laporan Wajib Pajak Pribadi Klien Penggugat untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012 telah terbukti Klien Penggugat sangat patuh menyampaikan SPT nya bahkan ada revisi/pembetulan segala (Bukti P-13) sehingga pada waktu itu Penggugat mempertanyakan seharusnya KPP Bantul (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) menyampaikan bukti-bukti bahwa Klien Penggugat selaku Wajib Pajak tidak patuh. Pada waktu itu Tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa pemeriksaan yang

Hal 9 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



dilakukan terhadap Klien Penggugat adalah bersifat random, acak sehingga dengan demikian menurut Penggugat tidak ada suatu kewajiban bagi Klien Penggugat untuk memenuhi pemeriksaan dari KPP Bantul, namun pada saat Klien Penggugat bertemu Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII di ruang kerja Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Klien Penggugat diinformasikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tergugat I bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan karena adanya laporan, dimana Surat Laporan tersebut diperlihatkan sepintas kepada Klien Penggugat. Apabila benar ada suatu Laporan entah dari siapapun Penggugat mohon agar Laporan tersebut diberikan kepada Klien Penggugat agar Klien Penggugat dapat menyampaikan Tanggapan dalam rangka pembelaan diri. Apabila suatu persangkaan yang tidak dijelaskan kepada Penggugat atau kepada Klien Penggugat, maka Penggugat beranggapan bahwa informasi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut tidak benar, bersifat fitnah yang tentunya mempunyai implikasi hukum bagi Klien Penggugat dan Penggugat akan melakukan langkah-langkah hukum berupa suatu tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Seharusnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara jujur menjelaskan kepada Penggugat bahwa pemeriksaan terhadap Klien Penggugat karena ada maksud-maksud jahat dan target-target tertentu dalam rangka memasukkan pajak bukan dengan trik-trik yang melawan hukum.

3. Informasi yang menyesatkan/tidak benar kepada Klien Penggugat yang merugikan Penggugat selaku Kuasa Hukum.

Dalam pertemuan di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Lantai 3 tanggal 16 Maret 2015 Tergugat I menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Klien Penggugat bersifat random, acak dan atas informasi tersebutpun Penggugat teruskan kepada Klien Penggugat, namun Klien Penggugat mendapat informasi lain dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pemeriksaan kepatuhan Klien Penggugat selaku Wajib Pajak karena adanya pengaduan.

Hal 10 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Dengan adanya dua informasi tersebut yaitu dasar pemeriksaan yang menurut Tergugat I bersifat random, acak dan dari Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menginformasikan adanya Surat Pengaduan, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I dalam penjelasan kepada Penggugat telah bersikap tidak jujur dan hanya mencari-cari kesalahan tentang ketidakpatuhan Klien Penggugat, padahal selama ini Klien Penggugat telah sangat patuh dalam hal Pajak baik selaku Pribadi atau Badan.

4. Tergugat I sampai Tergugat VII selalu mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar Klien Penggugat dalam hal Pajak.

Sebagaimana telah Penggugat sampaikan bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang selalu mencari-cari dan mengejar-ngejar serta mengganggu Klien Penggugat dalam hal pajak Badan mengakibatkan Klien Penggugat selaku pelaku usaha tidak nyaman menjalankan usahanya yang menghidupkan ratusan orang, belum termasuk para pengrajin di desa-desa dalam wilayah DIY.

Tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang selalu mencari kesalahan Klien Penggugat membuat Klien Penggugat menutup perusahaannya yaitu PT. Rumindo Pratama dan PT. Duta Prama Jaya. Terhadap penutupan kedua badan hukum tersebut Klien Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti P-14).

Atas perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, Klien Penggugat telah membuka perusahaan baru yaitu PT. Dowa Hanandy Utama dan memilih domicili hukum bukan di KPP Bantul tetapi di KPP Sleman. Dengan pemindahan lokasi tersebut seharusnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus menyadari kemarahan Klien Penggugat dan sekarang dikejar-kejar dalam masalah pribadi.

5. Kredibilitas Penggugat selaku Advokat & Pengacara tidak dipercaya Klien Penggugat.

Bahwa berdasarkan materi penjelasan tersebut di atas dan adanya informasi yang tidak benar dari Tergugat I dan dibandingkan dengan penjelasan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Klien Penggugat tidak mempercayai penjelasan dan



hasil pembicaraan yang disampaikan Penggugat di Kantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII.

Atas penjelasan Tergugat I yang berbeda dan bersifat bohong tersebut Penggugat menyatakan keberatan dan protes berat.

9. Bahwa atas Surat Penggugat pada butir 8 tersebut ternyata Tergugat I masih meragukan legalitas Penggugat sehingga mengirim Surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat No. S-18176/WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 2 April 2015 (Bukti P-15) yang pada pokoknya menanyakan apakah Penggugat terdaftar sebagai Konsultan Pajak atau tidak;

Bahwa terhadap Surat Tergugat I tersebut Penggugat telah menyampaikan Tanggapan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 8 April 2015 dengan No. 008/THS/PBP/IV/2015 tanggal 8 April 2015 (Bukti P-16) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saat itu KPP Bantul sedang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, NPWP : 24.645.916.8.543.000 untuk Tahun Pajak 2010, 2011 dan 2012, beralamat di Taman Griya Indah IV/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
2. Bahwa terhadap pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini tersebut, Ny. Delia Murwihartini – Klien Penggugat telah menunjuk Penggugat selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2015 dan atas dasar Surat Kuasa tersebut Penggugat menyampaikan Keberatan sehubungan dengan cara kerja KPP Bantul yang Penggugat nilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga pada tanggal 28 Februari 2015 Penggugat mengirim Surat Keberatan ke KPP Bantul sebagaimana terlampir;
3. Bahwa sehubungan dengan Surat Keberatan Penggugat pada tanggal 28 Februari 2015 Penggugat telah melakukan pertemuan pada tanggal 16 Maret 2015 dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang selama ini selalu mengejar-ngejar Klien Penggugat selaku Wajib Pajak baik Badan maupun Pribadi dan dalam pertemuan tersebut Penggugat menanyakan apakah pemeriksaan terhadap Klien Penggugat menyangkut ketidakpatuhan Pajak dan atas dasar apa pemeriksaan dilakukan dan pada waktu itu Tergugat I memberi penjelasan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak Ny. Delia Murwihartini adalah hanya menguji kepatuhan pajak dan bersifat random, acak.

Hal 12 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Bahwa atas penjelasan Tergugat I tersebut Penggugat menyampaikan bahwa selama ini, setidaknya-tidaknya untuk Tahun Pajak 2010, 2011, 2012 Klien Penggugat sangat patuh memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan karena pemeriksaan bersifat random, maka tidak ada suatu keharusan pemeriksaan terhadap Klien Penggugat;

4. Bahwa setelah pertemuan Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 16 Maret 2015, pada tanggal 24 Maret 2015, Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menelpon Klien Penggugat untuk datang ke Kantor Kanwil dan di Kantor Kanwil ada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I memberi penjelasan kepada Klien Penggugat bahwa pemeriksaan kepatuhan Wajib Pribadi tersebut karena adanya Pengaduan dari pihak lain, tetapi tidak menjelaskan Pengaduan dari siapa dan dalam bentuk atau materi apa pengaduan yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pajak Klien Penggugat dan Tergugat I melalui Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan memohon kepada Klien Penggugat agar tidak menggunakan Penggugat sebagai Kuasa Hukum dalam pemeriksaan kepatuhan Pajak;
5. Bahwa setelah pertemuan Klien Penggugat dengan Rudi Gunawan Bastari-Mantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, pada tanggal 28 Maret 2015 Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat memberi penjelasan dan tanggapan dalam hal sebagaimana telah diuraikan dalam butir 8 Posita diatas yaitu :
 - 5.1. Tentang Legalitas Penggugat selaku Kuasa Hukum Pajak;
 - 5.2. Tentang Materi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
 - 5.3. Informasi dari Tergugat I yang menyesatkan/tidak benar kepada Klien Penggugat yang merugikan Penggugat selaku Kuasa Hukum;
 - 5.4. KPP Bantul selalu mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar Klien Penggugat dalam hal pajak;
 - 5.5. Kredibilitas Penggugat selaku Kuasa Hukum tidak dipercaya Klien Penggugat.
6. Bahwa tindakan Tergugat I meminta penjelasan kepada Sekretaris Direktorat Pajak, apakah Penggugat – Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA terdaftar sebagai Konsultan Pajak yang memiliki izin praktek yang

Hal 13 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban seorang Kuasa. Terhadap pertanyaan Tergugat I dapat Penggugat sampaikan penjelasan sebagai berikut :

- 6.1. Pada tanggal 16 Maret 2015 di Lantai 3, ruang rapat KPP Bantul, Kepala KPP Bantul telah menanyakan Legalitas Penggugat sebagai Kuasa Hukum dan pada waktu itu Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-302/PP/IKH/2009 tertanggal 30 Juni 2009 tentang Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- 6.2. Bahwa Penggugat memiliki Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak karena selain telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pajak dan memiliki Sertifikat Perpajakan Setara Brevet A-B, angkatan XX yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 dengan nomor Sertifikat 032/LPLIH Perpajakan/IV/2009 (Bukti P-17);
- 6.3. Bahwa sebelum Penggugat diberikan izin praktek selaku Kuasa Hukum Pengadilan Pajak tentunya Direktorat Jenderal Pajak telah meneliti legalitas Penggugat misalnya apakah Penggugat telah memenuhi persyaratan yang berlaku seperti :
 - a. Yaitu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.01/2007 mengatur persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
 - b. Telah melalui penelitian dan berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap Permohonan Izin untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - c. Telah memperhatikan Nota Dinas Ketua Pengadilan Pajak No. ND-004/PP/2008 tanggal 26 September 2008 hal Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Pajak;
 - d. Dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan

Hal 14 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum;

- e. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 27, Tambahan Lembaran Negara No. 4189);
- f. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak;
- g. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.01/2007;
- h. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;
- i. Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak;

6.4. Bahwa pertanyaan dari Tergugat I ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tentang apakah Penggugat terdaftar sebagai Konsultan Pajak yang mempunyai izin Praktek yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 Permenkeu No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dan mohon agar dapat diberikan foto copy Surat Pengangkatan dan Surat Izin Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum wajib Pajak tersebut.

Pertanyaan tentang legalitas Penggugat dari KPP Bantul kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tanpa melampirkan foto copy yang telah Penggugat berikan, menurut Penggugat dilakukan dengan itikad tidak baik karena tanpa melampirkan copy Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat, pada hal pada tanggal 16 Maret 2015 Penggugat telah menyerahkan copy SK Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

Hal 15 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



10. Bahwa tindakan Tergugat I dan dibenarkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak Penggugat selaku Kuasa Hukum yang telah lama berpraktek sebagai Advokat dan Pengacara dan telah mempermalukan Penggugat karena sejak Penggugat menjadi Advokat dan Pengacara baru kali ini ditolak Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, padahal berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan tegas menyatakan antara lain :

Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini;*
- 2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien;*
- 3. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat;*

Pasal 2

- 1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;*
- 2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;*
- 3. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.*

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Hal 16 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya;*
- 2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.*

Pasal 21

- 1. Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
- 2. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1

- 1. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;*
- 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;*
- 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.*

Pasal 4

- 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
- 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
- 3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hal 17 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- 11.1. Tergugat I dan Tergugat II menolak Penggugat untuk mewakili Klien Penggugat, memberikan bantuan hukum dan pembelaan dalam hal pemeriksaan kepatuhan Pajak, pada hal Penggugat sebagai seorang Advokat dan Pengacara yang telah memenuhi syarat sebagai seorang Advokat dan telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penggugat juga sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak yang telah paham dengan ketentuan-ketentuan tentang Perpajakan dan telah mengikuti Pendidikan Keahlian Pajak pada Universitas Indonesia dan telah diangkat oleh Ketua Pengadilan Pajak;
- 11.2. Tergugat I menerbitkan Surat Penolakan Penggugat sebagai Kuasa Hukum untuk mendampingi Klien Penggugat dan menanyakan legalitas Penggugat sebagai Konsultan Pajak ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, padahal Surat Keputusan Penggugat dari Pengadilan Pajak telah Penggugat serahkan dan ketika Tergugat I mengirim surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tidak melampirkan Surat Keputusan Penggugat sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (Vide Bukti P-13);
- 11.3. Tergugat I menerbitkan Surat Perintah No. PEM-0014/WPJ.23/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang memerintahkan Damaris Hestanti Thomas (Tergugat III), Bayu Arista Putra (Tergugat IV) dan Ani Asharida (Tergugat V) untuk melakukan pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bukti P-14) dan atas perintah Tergugat I tersebut maka Damaris Hestanti Thomas (Tergugat III), Bayu Arista Putra (Tergugat IV) dan Ani Asharida (Tergugat V) telah melaksanakan dengan mendatangi Klien Penggugat;
- 11.4. C. Sujatmoko (Tergugat II) telah menerbitkan Surat No. S.63/WPJ.23/KP.0500/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang ditujukan kepada Klien Penggugat tentang Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen (Bukti P-15). Selain itu C. Sujatmoko (Tergugat II) juga meminta dokumen-dokumen berupa 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP, 2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 3. Rekening Koran bank, buku tabungan, 4. Perjanjian kontrak kerja, 5. Bukti kepemilikan harta, 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport, 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta

Hal 18 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



(formulir terlampir); 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir),
10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir), 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir), 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan (Vide Bukti P-10);

11.5. C. Sujiatmoko (Tergugat II) selaku Supervisor bersama-sama dengan Siti Nur Widowati (Tergugat VI) dan Fitra Jati Kusuma (Tergugat VII) telah menerbitkan Formulir Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Klien Penggugat;

11.6. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menolak Penggugat untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan serta mewakili Klien Penggugat sehubungan dengan pemeriksaan kepatuhan pajak di KPP Bantul yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII padahal Penggugat adalah seorang Advokat dan Pengacara yang juga sebagai penegak hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 yang berbunyi :

Advokat sebagai Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

11.7. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu melanggar Pasal 4 ayat 1, 2, 3 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 yang berbunyi:

Pasal 4

- 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum;*
- 2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;*
- 3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.*

12. Bahwa penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII terhadap Penggugat untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada Klien Penggugat atau mewakili Klien Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat baik moril dan materiil yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal 19 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



1. Kerugian Materiil;

Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat dan Pengacara dalam pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa Advokat berhak mendapat honorarium. Honorarium adalah imbalan jasa hukum diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum untuk mendampingi dan mengurus permasalahan Klien Penggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-16) tetapi karena penolakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, maka Penggugat mengalami kerugian yaitu Surat Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum tidak terlaksana sehingga Klien Penggugat tidak menggunakan Jasa Hukum Penggugat yang berakibat Penggugat tidak menerima Honorarium sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kerugian material lainnya yang diderita Penggugat yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka membela dan mempertahankan hak-hak Penggugat atas penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yaitu biaya-biaya akomodasi berupa hotel. Tiket Jakarta – Yogyakarta PP untuk mengajukan Gugatan ini diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dengan demikian kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil;

Penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII terhadap Penggugat untuk mewakili, mendampingi atau memberikan bantuan hukum dan para penyandang profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) serta pembelaan kepada Klien Penggugat, telah mempermalukan Penggugat bahkan Klien Penggugat meragukan legalitas Penggugat sebagai seorang Pengacara Profesional dan penolakan yang telah mempermalukan Penggugat di hadapan Klien Penggugat, telah merendahkan harkat martabat Penggugat yang telah lama menjalani profesi sebagai Advokat dan Pengacara bahkan memiliki keahlian tambahan yang tidak dimiliki semua Advokat.

Penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Penggugat untuk menjalankan profesi yaitu mendampingi atau mewakili Klien Penggugat atau memberikan bantuan hukum sesuai Undang-

Hal 20 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah sangat memermalukan, mencemarkan, menghina Penggugat dalam menjalankan profesinya yang kesemuanya tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi supaya ada pedoman/patokan nilai nominal untuk membayar kerugian immaterial Penggugat, maka Penggugat tetapkan nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat – Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menolak Penggugat menjalankan profesi sebagai Advokat telah nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya penghasilan Penggugat yang merupakan hak Penggugat untuk memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Advokat yang berbunyi : Pasal 21

1. *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;*
2. *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat-Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah terbukti menimbulkan kerugian sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus dihukum untuk membayar ganti rugi dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat bersalah karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan para penyandang profesi Advokat sehingga harus dinyatakan dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI.

14. Bahwa penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII terhadap Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat bukan seorang Konsultan Pajak dan tidak memahami profesi Advokat dan Pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003. Penolakan Penggugat dikatakan karena bukan sebagai Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 229/PMK.03/2014 tanggal 18 Desember 2014, namun dalam prakteknya banyak orang yang bukan Konsultan Pajak juga mengurus masalah pajak di KPP Bantul, bahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selalu menawarkan penyelesaian damai ke pihak-pihak yang mengurus pajak dengan mengiming-imingi agar jumlah pajak yang disetor ke Kas Negara dapat dikurangi agar selisih pembayaran diberikan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII. Perbuatan-perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII

Hal 21 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



yang menolak Penggugat untuk menjalankan profesinya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bertentangan dan melawan Undang-undang Advokat dan Undang-undang Bantuan Hukum;

15. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VII karena ditolaknya Penggugat untuk melakukan pendampingan, memberikan bantuan hukum kepada Klien Penggugat, Penggugat telah pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul terdaftar dengan No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl dan pada tanggal 8 Desember 2015 Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- *Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*

DALAM REKONVENSI :

- *Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- *Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);*

16. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 8 Desember 2015, Penggugat pada tanggal 8 Desember 2015 telah menolak Putusan tersebut dengan menandatangani Akta Permohonan Banding (Bukti P-19) dan pada tanggal 17 Mei 2016 Penggugat telah mencabut permohonan banding tersebut dengan menandatangani Akta Pencabutan Permohonan Banding No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 17 Mei 2016 (Bukti P-21);

17. Bahwa dalam Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2015 tanggal 8 Desember 2015 terhadap Gugatan Penggugat yang amarnya sebagaimana tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu Gugatan yang tidak jelas, kabur (obcuur libel) harus dilihat secara kasuistis, satu persatu, kasus perkasus, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama tentang Surat Gugatan

Hal 22 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



dalam perkara aquo, dikarenakan Surat Gugatan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Keberatan (eksepsi) mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*) dengan menyatakan bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Hukum Para Tergugat karena Penggugat secara tanpa dasar telah menggugat Para Tergugat secara pribadi sekaligus secara jabatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa dengan seksama surat gugatan dari Penggugat telah diperoleh fakta dengan nyata bahwa benar Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara in casu menempatkan Para Tergugat sebagai pihak secara pribadi maupun secara jabatan, hal ini dapat dilihat dalam gugatan halaman 1 sampai 2 yang menulis identitas para Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak sekaligus selaku pribadi dengan alamat rumah masing-masing Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai halaman 5 pada point No. 4.4.1, 4.4.4, 4.5, 4.6, 5, dan 8, halaman 11 point No.6, halaman 15 point No. 12.1 sampai dengan point No. 12.5, terlihat dengan jelas bahwa pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara in casu menempatkan Para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggabungan kedudukan Para Tergugat, di satu sisi menempatkan Para Tergugat sebagai pribadi maupun secara jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, Majelis Hakim sependapat dengan kuasa para Tergugat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga karena akan menimbulkan konsekuensi hukum lebih lanjut yaitu Putusan tidak dapat dilaksanakan (*unexecutable verdict*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dan lagi pula apabila Penggugat ingin menempatkan kedudukan Para Tergugat selaku pribadi, harusnya Penggugat

Hal 23 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



dapat memisahkan secara detail yang jelas mana kapasitas Para Tergugat sebagai pribadi maupun mana kapasitas Para Tergugat secara jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, akan tetapi setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil-dalil Gugatan Penggugat Majelis menemukan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut lebih cocok menempatkan Para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan dan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis tidak menemukan dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan tindakan-tindakan pribadi apa yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438-439, disebutkan bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga dapat diajukan exception in persona dengan alasan kesalahan menempatkan kedudukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat- Tergugat I sampai dengan Tergugat VII patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Para Tergugat pada point 1 (satu) yaitu mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aan Hoedanigheid) dan point 3 (tiga) yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) telah dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard), maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, untuk mempersingkat putusan ini akan diambil alih dan dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanya patut dan berdasar terhadap gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaart);

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka atas gugatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi- ini Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya pihak Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi mohon diberlakukan dan dibaca secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara, konvensi in casu dalam Rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti Gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan penyangkalan juga dari Para Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat secara formil dan oleh karenanya pokok perkara dalam Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis berpendapat terhadap Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 25 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



18. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl yang telah diputus pada tanggal 8 Desember 2015 dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum karena Gugatan Penggugat tidak jelas karena menempatkan Para Tergugat baik dalam Jabatan dan Selaku Pribadi dan karena itu Penggugat mengajukan Gugatan kembali dalam 2 (dua) berkas Gugatan yaitu baik selaku Pejabat-pejabat Pajak /aparatur Pemerintah yang melanggar hukum maupun selaku Pribadi-pribadi yang karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
19. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai Gugatan nebis in idem karena Putusan dalam Gugatan No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga materi pokok perkara belum diperiksa;
20. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yaitu menolak Penggugat untuk mendampingi, mewakili, memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada klien Penggugat dalam pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Bantul, mencerminkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, tidak profesional, berlaku diskriminatif, arogan, angkuh, bertindak berlebihan, tidak taat dan paham hukum khususnya profesi Advokat dan Undang-undang Bantuan Hukum dan penolakan Penggugat untuk mendampingi klien Penggugat bukan dalam rangka penegakan hukum tetapi demi kepentingan pribadi, mencari keuntungan atau tambahan rejeki bahkan lebih terkesan memeras wajib pajak, menawarkan penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan wajib pajak yang tidak paham hukum.
- Penolakan Penggugat dengan dalil bahwa Penggugat bukan Konsultan Pajak dilakukan secara diskriminatif karena dilain kesempatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dapat menerima pihak lain yang bukan Konsultan Pajak untuk mengurus masalah-masalah pajak.
- Penolakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan, tidak dalam rangka menjalankan tugas profesinya tetapi semat-mata demi kepentingan dan keuntungan pribadi sehingga Tergugat I sampai Tergugat VII harus bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang arogan, angkuh, tidak profesional, dan diskriminatif terhadap Penggugat, apalagi sebagai Pegawai

Hal 26 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Negeri Sipil (PNS) yang gagal memahami peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Advokat dan Undang-undang Bantuan Hukum;

21. Bahwa karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VII akan diikuti dengan tuntutan ganti rugi, maka dalam rangka pemenuhan tuntutan ganti rugi agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VII bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Penggugat, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII harus dihukum tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan harus dibayar seketika setelah Putusan Majelis Hakim diucapkan;
22. Bahwa dalam rangka pemenuhan pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial terhadap Penggugat, maka mohon Majelis Hakim meletakkan Conservatoir Beslaag (Sita Jaminan) terhadap aset-aset pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sehingga pada waktunya dapat dijual Lelang untuk dapat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
 - 22.1. Tergugat I : Tanah dan Bangunan di Jl. Nandan Rt. 007/Rw. 039, Sariharjo, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta;
 - 22.2. Tergugat II : Tanah dan Bangunan di Karang Nangko Rt. 03/Rw. 19 No. 363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
 - 22.3. Tergugat III : Tanah dan Bangunan di Jl. Sambu Legi Rt. 07/Rw. 55 No. 49, Sleman, Yogyakarta;
 - 22.4. Tergugat IV : Tanah dan Bangunan di Jl. Manding Kidul Rt. 07, Kel. Trirengo, Bantul, Yogyakarta;
 - 22.5. Tergugat V : Tanah dan Bangunan di Jl. Dayu Rt. 01 No. 11, Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta;
 - 22.6. Tergugat VI : Perumahan Palem Hijau No. 123, Jl. Godean Km. 7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta;
 - 22.7. Tergugat VII : Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;

Selain dari pada itu mohon rekening-rekening pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada Bank-bank yang akan diberitahukan kemudian, mohon diblokir dan disisihkan sebagian uangnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

PETITUM/PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal 27 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat memiliki kapasitas dan legalitas sebagai Advokat dan Pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada Klien Penggugat dalam hal pajak;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan sah Sita Jaminan terhadap :
 - 5.1. Aset Tergugat I : Jl. Nandan Rt. 007/Rw. 039, Sariharjo, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta;
 - 5.2. Aset Tergugat II : Tanah dan Bangunan di Karang Nangko Rt. 03/Rw. 19 No. 363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta;
 - 5.3. Aset Tergugat III : Tanah dan Bangunan di Jl. Sambi Legi Rt. 07/Rw. 55 No. 49, Sleman, Yogyakarta;
 - 5.4. Aset Tergugat IV : Tanah dan Bangunan di Jl. Manding Kidul Rt. 07, Kel. Trirengo, Bantul, Yogyakarta;
 - 5.5. Aset Tergugat V : Tanah dan Bangunan di Jl. Dayu Rt. 01 No. 11, Gading Sari, Sanden, Bantul, Yogyakarta
 - 5.6. Aset Tergugat VI : Tanah dan Bangunan di Perumahan Palem Hijau No. 123, Jl. Godean Km. 7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta
 - 5.7. Aset Tergugat VII : Datanya akan disusulkan dalam Surat Permohonan tersendiri;
6. Menyatakan sah pemblokiran rekening-rekening Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk mengizinkan/memperbolehkan Penggugat untuk mewakili Klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat;

Hal 28 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar Para Tergugat dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII, datang menghadap Kuasanya LESTARI, SH dan HERMAN ABDURRAHMAN, SH, serta Para Tergugat Principal kecuali Tergugat III.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEWI KURNIASARI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 39 /Pen.Med.Pdt.G /2016 /PN.Btl, tanggal 22 Agustus 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Agustus 2016 Penggugat menyatakan mengajukan revisi/perubahan gugatan pada identitas dan alamat para Tergugat khususnya untuk Tergugat IV dan Tergugat VI, yang pada pokoknya perubahan tersebut berubah menjadi sebagai berikut;

Identitas dan alamat Para Pihak:

- Untuk Tergugat IV, atas nama **Bayu Arista Putra** dalam gugatan disebutkan beralamat di KPP Pratama Bantul, Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711 dan sekarang beralamat di Kantor Wilayah Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat di Jl. Ring Road Utara No. 10, Maguharjo, Depok Sleman, DIY
- Untuk Tergugat VI atas nama **Siti Nur Widowati** dalam gugatan disebutkan beralamat di KPP Pratama Bantul, Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Gose, Bantul 55711 dan sekarang beralamat di KPP Pratama Penajam, J. Ahmad Yani No.1, Balik Papan, Kalimantan Timur.

Hal 29 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

- I. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
- II. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam angka 12 poin 1 halaman 17 Gugatannya, saat ini Penggugat bukanlah Kuasa Hukum dari Wajib Pajak bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, dan oleh karenanya Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini tersebut;
- III. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini bukanlah Kuasa Hukum maupun Kuasa Pajak dari Wajib Pajak bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini maka Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang menggunakan data-data perpajakan Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini demi kepentingan pribadi Penggugat;
- IV. Bahwa Penggugat tidak memiliki kaitan hukum apapun dengan proses Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Wajib Pajak Dra. Hj. Delia Murwihartini sehingga Penggugat tidak memiliki dasar untuk memperlakukan Pemeriksaan Pajak tersebut;
- V. Bahwa selebihnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, Para Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (*GEMIS AAN HOEDANIGHEID*)

1. Penggugat telah salah dalam menentukan Subjek Hukum Para Tergugat karena Penggugat telah menggugat Para Tergugat secara pribadi, padahal apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak satupun akibat tindakan pribadi Para Tergugat, melainkan sebagai konsekuensi tugas dan fungsi Para Tergugat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
 - a. Bahwa dari kesemua dalil Penggugat terlihat dengan jelas bahwa pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo menempatkan para Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi dan oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan Para Tergugat

Hal 30 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan.

- b. Bahwa gugatan *a quo* pada intinya memperlmasalahakan tindakan Para Tergugat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Bahwa tindakan Para Tergugat sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan jabatannya diakui oleh tergugat dalam gugatannya:

Halaman 3 angka 3

.... Klien Penggugat mendapat surat panggilan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk menjalani pemeriksaan pajak dalam hal kepatuhan selaku Wajib Pajak Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (KPP Bantul).

Seandainya tindakan Para Tergugat sebagai pribadi, apakah Para Tergugat dapat melakukan pemeriksaan pajak? dan apakah Para Tergugat dapat berdomisili di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (KPP Bantul)?

Halaman 3 angka 4

.... Penggugat telah menyurati Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 28 Februari 2015 (bukti T-9) yang pada pokoknya menyampaikan keberatan dengan cara kerja KPP Bantul,...

Seandainya tindakan Para Tergugat sebagai pribadi, mengapa Penggugat menulis surat kepada pegawai/pejabat di KPP Bantul?

Halaman 3 angka 4.1;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 berdasarkan Surat No. 00014/WPJ32/KP0505/RIKSIS/2015 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul- S. Josephine M. Widwijanti-NIP. 196803221995032001 (Tergugat I) telah memerintahkan:

- 1. C. Sujatmoko - NIP 196508301985031001(Tergugat II)*
- 2. Damaris HT - NIP 197701311996032001(Tergugat III)*
- 3. Bayu Arista Putra - NIP 198404172006021001(Tergugat IV)*
- 4. Ani Asharida - NIP 198909062010122022(Tergugat V)*
- 5. Siti Nur Widowati - NIP 197305061993022001(Tergugat VI)*
- 6. Fitra Jati Kusumo - NIP 198506162007011001(Tergugat VII)*

untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap klien Penggugat...

Seandainya tindakan Para Tergugat sebagai pribadi, mengapa Penggugat mendalilkan Tergugat I s.d. Tergugat VII memiliki Nomor

Hal 31 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Bt



Induk Pegawai? mengapa Tergugat I dapat memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan dan menulis surat kepada pegawai/pejabat di KPP Bantul?

Halaman 26 angka 7:

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk mengizinkan /memperbolehkan Penggugat untuk mewakili klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat

Seandainya tindakan Para Tergugat sebagai pribadi, maka apakah dasar Para Penggugat sebagai pribadi dapat mengizinkan/memperbolehkan Penggugat untuk mewakili klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat?

- c. Selanjutnya **Para Tergugat menyampaikan bahwa masih terdapat banyak dalil Penggugat yang menunjukkan ketidakpahaman Penggugat dalam membedakan antara tindakan Subjek Hukum sebagai pribadi dengan tindakan sebagai jabatan**. Hal ini dapat dilihat dari semua dalil penggugat (*vide*: halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9, halaman 10, halaman 15, halaman 16, halaman 17, halaman 18, halaman 19, halaman 23, halaman 24, halaman 25, dan halaman 26) termasuk pertitum yang dimohonkan oleh Penggugat yang menurut hemat Para tergugat tidak perlu lagi untuk dikutip kesemuanya dalam jawaban ini mengingat tak terbantahnya fakta bahwa Penggugat mempermasalahkan tindakan Para Tergugat sebagai Pejabat administrasi.
- d. Bahwa Penggugat tidak pernah mendalilkan tindakan-tindakan pribadi apa dan bagaimana yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi dan Para Tergugat yakin bahwa Penggugat tidak akan mampu membuktikan hal tersebut karena Para Tergugat tidak pernah melakukan tindakan dalam kapasitas selaku pribadi, tetapi semata-mata hanya pelaksanaan tugas dan perintah jabatan.
- e. Bahwa Penggugat pada halaman 23 angka 18 gugatannya mendalilkan:

Hal 32 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara No.28/Pdt.G/2015/PN.Btl yang telah diputus pada tanggal 8 Desember 2015 dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan karena menempatkan Para Tergugat baik dalam Jabatan dan selaku pribadi dan karenanya itu Penggugat mengajukan gugatan kembali dalam 2 (dua) berkas gugatan yaitu baik selaku pejabat-pejabat pajak/aparatur pemerintah yang melanggar hukum maupun selaku pribadi-pribadi yang karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

- f. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas menunjukkan kekeliruan yang nyata dari pemahaman Penggugat dalam menentukan Subjek Hukum yang akan digugat. adapun dalam gugatan a quo, Penggugat tidak pernah sama sekali mendalilkan tindakan pribadi mana yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Alih-alih membuktikan tindakan pribadi, Kesemua dalil Penggugat menunjukkan bahwa tindakan-tindakan penggugat merupakan tindakan sebagai akibat Para tergugat dalam kedudukan jabatan sebagai Pegawai DJP.
- g. Bahwa apabila Penggugat ingin mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat, maka Gugatan tersebut hanya dapat diajukan kepada Para Tergugat selaku Pejabat Administrasi karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan.**
- h. Berdasarkan dalil Para Tergugat tersebut, sangatlah nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam menentukan Subjek Hukum yang digugat sehingga sudah seharusnya kiranya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat.
2. Bahwa kesemua dalil-dalil Para tergugat di atas juga sekaligus telah membuktikan bahwa sadar/atau tidak sadar, Penggugat telah menggabungkan dua subjek hukum yaitu menggugat Para Tergugat selaku pribadi atas tindakan Para Tergugat Selaku pejabat administrasi dan oleh karenanya gugatan ini menjadi gugatan yang kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; (meskipun Penggugat membuat judul gugatan pribadi).

Hal 33 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



3. Bahwa oleh karena tidak terbantahkan lagi bahwa sebenarnya apa yang dipermasalahkan Penggugat adalah tindakan Para Tergugat **sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan**, maka Penggugat juga telah keliru mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang seharusnya tidak dapat digugat baik secara jabatan maupun secara pribadi karena tindakan Para Tergugat semata-mata hanya melaksanakan tugas dan perintah jabatan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 36A ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menyatakan secara jelas sebagai berikut:

“Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penjelasan:

Pegawai Pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/ atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme.”

- b. Bahwa iktikad baik Para Tergugat juga diakui secara terang dan nyata oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam angka 4.6. Gugatan, yang menyatakan:

“Bahwa apabila maksud dan tujuan yang baik dari KPP Pratama Bantul (Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya) untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan...”

4. Selanjutnya Para Tergugat juga menyampaikan bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113). Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977.

Hal 34 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



5. Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul **menyatakan Penggugat kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan sehingga Gugatan cacat formil atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).**

B. EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR

Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan a quo sehubungan dengan pemeriksaan Wajib Pajak.

1. Bahwa Penggugat pada posita Gugatannya, mendalilkan sebagai berikut:
angka 3

“Bahwa Penggugat dalam menjalankan profesinya, pada tanggal 25 Februari 2015 mendapat seorang klien yang bernama Ny. Dra. Delia Murwihartini, beralamat di Taman Griya Indah IV/300, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dalam permasalahan pemeriksaan kepatuhan perpajakan selaku pribadi sehingga klien Penggugat mendapat panggilan dari Tergugat I sampai dengan VII untuk menjalani pemeriksaan dalam hal kepatuhan selaku Wajib Pajak pribadi”

angka 8.2

“Tentang materi dan tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga pada waktu itu Penggugat mempertanyakan dalam hal apa klien Penggugat,.....”

..., telah terbukti klien Penggugat sangat patuh menyampaikan SPT nya bahkan ada revisi pembetulan segala

..., acak sehingga dengan demikian menurut Penggugat tidak ada sesuatu kewajiban bagi klien Penggugat untuk memenuhi pemeriksaan dari KPP Bantul,...

..., Apabila benar ada suatu laporan entah dari siapapun Penggugat mohon agar laporan tersebut diberikan kepada Penggugat agar klien Penggugat dapat menyampaikan tanggapan dalam rangka pembelaan diri”

Hal 35 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



2. Bahwa Penggugat masih mendudukan dirinya selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, sementara Penggugat sendiri telah mengakui secara terang dan nyata bahwa Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai kuasa Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sebagaimana pada angka Seharusnya 12 poin 1 halaman 17 Gugatan.
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga tidak pernah mendalilkan bahwa Penggugat telah menerima kuasa khusus dari Ny. Dra. Delia Murwihartini untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan terhadap Para Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat nyata bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat atau setidaknya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

C. EKSEPSI GUGATANPENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

GugatanPenggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (onduidelijk)dengan alasan sebagai berikut:

1. Subjek Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas
 - a. Bahwa sejalan dengan kesemua dalil-dalil Para Tergugat dalam eksepsi salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aan hoedanigheid*), maka telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah menggabungkan gugatan terhadap dua subjek hukum sekaligus yaitu menggugat Para Tergugat selaku pribadi atas tindakan Para Tergugat Selaku pejabat administrasi.
 - b. Bahwa tindakan Penggugat yang secara keliru telah menggabungkan kedudukan Para Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara dengan sebagai pribadi telah menyebabkan subjek Gugatan menjadi tidak jelas (kabur). Kaburnya subjek Gugatan ini tidak dapat dibenarkan dengan dalil apapun juga karena menimbulkan konsekuensi hukum lebih lanjut yaitu Putusan tidak dapat dilaksanakan (*unexecutable verdict*).
2. Kedudukan Hukum PenggugatKabur dan Tidak Jelas

Hal 36 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- a. Bahwa Penggugat tidak dapat menentukan kedudukan hukum Penggugat, apakah sebagai Kuasa Hukum Wajib Pajak yang bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini atau sebagai pribadi Penggugat sendiri.
 - b. Bahwa Penggugat secara berulang-ulang mendalilkan Gugatannya dengan menggunakan data perpajakan Wajib Pajak yang bernama Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini (*vide* Gugatan angka 3 sampai dengan angka 9 halaman 3 sampai dengan halaman 10);
 - c. Bahwa penggunaan data perpajakan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini membuktikan Penggugat masih mendudukkan dirinya selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, sementara Penggugat sendiri telah mengakui secara terang dan nyata bahwa Penggugat tidak lagi menjadi Kuasa Hukum Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sebagaimana pada angka 12 poin 1 halaman 17 Gugatan;
 - d. Bahwa tindakan Penggugat yang masih mendudukkan dirinya selaku Kuasa Hukum Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini, telah membuktikan bahwa Penggugat mencampuradukkan kedudukan hukumnya baik selaku mantan Kuasa Hukum Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini maupun secara pribadi telah menyebabkan gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas.
3. Bahwa Gugatan Penggugat juga kabur dan tidak terang (*onduidelijk*) karena Posita dengan Petitum Gugatan tidak bersesuaian satu sama lain.
- a. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya tidak pernah sama sekali mendalilkan tindakan pribadi mana yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
 - b. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya halaman 25 angka 2 menyatakan:
Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap penggugat
 - c. Bahwa tentu saja dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar. Penggugat bahkan tidak pernah menyebutkan sama-sekali perbuatan hukum pribadi apa yang dimaksud Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Hal 37 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- d. Bahwa ketidaksesuaian isi gugatan dengan apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum tersebut diatas menunjukkan dengan nyata, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan penggugat adalah Gugatan yang kabur dan sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Petitum Penggugat merupakan permohonan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) karena:
- 4.1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagai pribadi Para tergugat dan bukan sebagai pejabat administrasi di lingkungan DJP.
- 4.2 Bahwa pengajuan gugatan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan petitum Gugatan angka 7 halaman 26 yang menyatakan:
“Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk mengizinkan/memperbolehkan Penggugat untuk mewakili klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat.”
- 4.3 Bahwa hal yang dimintakan oleh Penggugat merupakan permintaan tidak dapat dilaksanakan karena Para Penggugat selaku pribadi tidak memiliki kapasitas untuk mengizinkan/memperbolehkan Penggugat untuk mewakili klien Penggugat dalam pemeriksaan tentang Kepatuhan Pajak terhadap Klien Penggugat
- 4.4 Berdasarkan uraian tersebut makaterbukti berdasar hukumbahwa dalil Gugatan Penggugat telah saling tidak berkesesuaian dan tidak memiliki hubungan kausal sertatidak saling mendukung dengan petitum Gugatan sehingga menyebabkan GugatanPenggugat kabur (*obscur libel*);
- 4.5 Bahwa Petitum Gugatanyang tidak saling mendukung dengan posita menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (*vide* Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 448 s.d. 453). Hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 582.K/Sip/1973.
5. Petitum Penggugat merupakan Petitum yang tidak jelas
- a. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya halaman 26 angka 6 menyatakan:

Hal 38 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Menyatakan sah pemblokiran rekening rekening-rekening Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

- b. Bahwa terdapat setidaknya dua hal yang sangat tidak jelas dari apa yang dimintakan oleh Penggugat tersebut di atas yaitu:
 - 1) Tidak jelas rekening apa, nomor rekening berapa dan bank-bank apa yang dimaksud oleh Penggugat.
 - 2) Tidak jelas siapa yang diperintahkan untuk melakukan pemblokiran atas rekening-rekening yang tidak jelas juga objeknya.
- c. Bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukkan ketidakmampuan Penggugat tidak hanya dalam hal menentukan pihak yang akan digugat, tetapi juga telah secara nyata tidak dapat merumuskan apa yang diinginkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya.
- d. bahwa Petitum Penggugat merupakan petitum yang tidak jelas, kabur dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan **Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas (*onduidelijk*) atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).**

D. EKSEPSI GUGATANKURANG PIHAK (*PLURIUM LITISCONSORTIUM*)

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatankurang pihak karena tidak lengkap pihak-pihak yang berperkara

1. Bahwa sebagaimana Para Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi di atas, Penggugat berulang kali mendalilkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai penolakan Para Tergugat terhadap Penggugat untuk mewakili mantan klien Penggugat *in casu* Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dalam hal Pemeriksaan Pajak (*vide* Gugatan halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9, halaman 10, halaman 15, halaman 16, halaman 17, halaman 18, halaman 19, halaman 23, halaman 24, halaman 25, dan halaman 26);
2. Bahwa Penggugat juga selalu mempermasalahkan prosedur Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sementara Penggugat bukanlah Kuasa Hukum Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini;

Hal 39 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



3. Bahwa GugatanPenggugat didasarkan pada data-data perpajakan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini dalam kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak;
4. Bahwa kaitan hukum antara Penggugat dengan Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini juga secara nyata dan terang dalam dalil gugatan Punggugat halaman 17 angka 1 yang menyatakan:

*“Penggugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum untuk mendampingi dan mengurus permasalahan Klien Punggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-16) tetapi karena penolakkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII maka Punggugat mengalami kerugian yaitu Kontrak Kerja tidak terlaksana sehingga **Klien Punggugat tidak menggunakan Jasa Hukum Punggugat** yang berakibat Punggugat tidak menerima Honorarium.”*

5. Bahwa apapun kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, merupakan akibat dari Perbuatan **Klien Punggugat yang tidak menggunakan Jasa Hukum Punggugat sehingga sudah seharusnya** Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti berdasar hukum terdapat hubungan yang sangat erat antara pokok perkara dengan Wajib Pajak Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sehingga tidak ikut sertanya Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini sebagai Pihak dalam perkara a quo menyebabkan Gugatan kurang pihak (vide Buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, halaman 439 jo. yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 621.K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977).
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantulmenyatakan menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke **verklaard**).

E. EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang diajukan secara licik.

1. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara a quo terjadi sejak tahun 2015 dimana pada bulan April 2015,

Hal 40 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Penggugat sudah mengajukan perkara *a quo* untuk diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2015/PN.Btl dan telah diputus pada tanggal 8 Desember 2015.

2. Bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Para Tergugatberulang kali kepada Penggugat bahwa penolakan yang dilakukan oleh Para Tergugat semata-mata karena Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya Penggugat tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi yang harus ditunjukkan oleh seorang kuasa Wajib Pajak apabila hendak menjadi kuasa.
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menolak Penggugat sebagai kuasa pajak dari klien Penggugat apabila persyaratan Penggugat sebagai kuasa dalam hal perpajakan dapat dipenuhi Penggugat. Akan tetapi hingga saat ini atau 1 (satu) tahun berlalu, Penggugat tetap tidak juga melengkapi persyaratan administrasi tersebut dan mengajukan kembali gugatan *a quo*, menuduh Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugatseringkali menggunakan asumsi pribadi yang tidak didukung dengan fakta hukum materiil yang kuat dan merupakan fitnah yang sangat kejam terhadap diri Para Tergugat karena bersifat tendensius dan menyudutkan pribadi Para Tergugat sebagai aparatur negara yaitu sebagai berikut:
 - a. Halaman 7 angka 2 Gugatan menyatakan Para Tergugat memperlihatkan laporan kepada klien Penggugat. Dalil tersebut merupakan kebohongan besar belaka dan tentu saja tidak akan dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat maupun oleh klien Penggugat sekalipun.
 - b. Halaman 8 angka 3 dan 4 yang menyatakan Para Tergugat memberikan informasi yang menyesatkan/tidak benar kepada Klien Penggugat bernama Ny. Delia Murwihartini dan mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar Klien Penggugat dalam hal pajak. Atas pernyataan Penggugat tersebut, Para Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - 1) Para Tergugat bertugas pada institusi negara yang bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagai pegawai

Hal 41 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktorat Jenderal Pajak juga telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk tindakan pemeriksaan yang dilakukan Para Tergugat terhadap mantan klien Penggugat.

- 2) Sangat tidak berdasar tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat memberikan informasi yang menyesatkan/tidak benar karena apa yang disampaikan Para Tergugat telah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 3) Lebih lanjut, terkait pernyataan Penggugat bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan Para Tergugat sebagai tindakan mencari-cari kesalahan dan mengejar-ngejar mantan klien Penggugat merupakan opini pribadi Penggugat yang tidak didukung fakta hukum materil yang kuat bahwa tindakan pemeriksaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 4) Perlu Para Tergugat sampaikan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam rangkaian pemeriksaan pajak adalah dalam rangka pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Para Tergugat hanya menjalankan tugas dan bertindak dengan prinsip kehati-hatian demi kepentingan negara dan juga kepentingan Wajib Pajak.
5. Sikap Penggugat yang melontarkan pernyataan tanpa didukung fakta hukum materil sangat disayangkan mengingat profesi Penggugat sebagai advokat yang seharusnya lebih menguasai peraturan perundang-undangan dibandingkan masyarakat pada umumnya.
6. Bahwa selain itu, Penggugat mempermasalahkan kewenangan Para Tergugat yang melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (**"UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"**) yang menyatakan :

"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan"

Hal 42 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Bahwa terlihat dengan terang dan jelas Penggugat secara licik telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan menggunakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Bahwa perjanjian kontrak antara Penggugat dan kliennya tidak ada kaitan dengan Para Tergugat dan merupakan hak sepenuhnya dari mantan klien Penggugat tersebut.

Oleh karena telah terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan licik, tidak berdasar dan tidak beritikad baik, maka sudah seharusnya Majelis Hakim agar memutuskan dalam putusan sela yang menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat licik, tidak berdasar dan tidak beritikad baik atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

A. Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa di Bidang Perpajakan

1. Bahwa Penggugat tidak mengerti dan memahami perbedaan antara:

- a. advokat atau pengacara;
- b. konsultan pajak; dan
- c. kuasa pada Pengadilan Pajak.

Padahal ketiga bidang profesi di atas telah diatur secara jelas, termasuk persyaratannya di dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah. **Penggugat yang katanya telah lama menjalani profesi sebagai Advokat dan Pengacara bahkan memiliki keahlian tambahan yang tidak dimiliki semua Advokat seharusnya telah mengetahui hal tersebut.**

2. Bahwa Penggugat menyatakan memiliki keahliannya sebagaimana Penggugat sampaikan pada halaman 2 angka 2 posita Gugatannya yaitu;

“Bahwa Penggugat sebagai advokat dan pengacara yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memiliki spesialisasi tambahan sebagai advokat yaitu:

Hal 43 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



1. sebagai Kurator dan Pengurus yang diangkat berdasarkan SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei 2008 (Bukti P-4);
 2. Sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009 (Bukti P-5);
 3. Sebagai Mediator Bersertifikat berdasarkan Surat Keputusan No. 00006/PPM.A.6/FH.UNTAR/IV/2010 tanggal 17 April 2010 (Bukti P-6);
 4. Sebagai Legal Auditor berdasarkan keputusan Certified Legal Auditor tanggal 2 Juli 2014 (Bukti P-7);”
3. Bahwa seharusnya dengan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman yang telah Penggugat dalilkan tadi, Penggugat seharusnya mengetahui bahwa sertifikasi Penggugat di atas tidak serta-merta menjadikan Penggugat memenuhi persyaratan menjadi kuasa Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak karena terdapat persyaratan dalam diri Penggugat yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (PMK 229/PMK.03/2014).
4. Bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur ketentuan mengenai Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa di Bidang Perpajakan yaitu:

Pasal 32 ayat (3)

“Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (3)

“Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.



Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima kuasakhusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhikewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

5. Bahwa sesuai amanat ketentuan undang-undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Bahwa PMK 229/PMK.03/2014 mengatur dengan jelas terkait persyaratan, hak dan kewajiban kuasa Wajib Pajak yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4)

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. **konsultan pajak;** dan
- b. *karyawan Wajib Pajak.*

Pasal 5 ayat (1)

*Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila **memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.***

Pasal 6 ayat (1)

*Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan **Wajib Pajak**, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan **dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.***

Pasal 6 ayat (2)

*Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana **dimaksud** pada ayat (1) sebagai berikut:*

- a. **fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;**

Hal 45 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- b. surat **pernyataan sebagai konsultan pajak**;
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 8

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

6. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dengan jelas dan tegas mengatur persyaratan untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak.

B. Tentang Kapasitas Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Kuasa Wajib Pajak dan Fakta Bahwa Penggugat Bukan Seorang Konsultan Pajak.

1. Bahwa Penggugat bukanlah seorang konsultan pajak sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa wajib pajak sesuai dengan ketentuan PMK No.229/PMK.03/2014 Tanggal 31 Desember 2014.
2. Bahwa apabila diteliti dengan seksama sumber sengketa perkara a quo adalah ketidak-pahaman Penggugat untuk membedakan antara profesi Advokat dengan profesi Konsultan Pajak. Penggugat juga tidak mengerti dan mengetahui persyaratan apasaja yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
3. Bahwa Penggugat dalam halaman 13 angka 10 dalil Gugatannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa tindakan Tergugat I dan dibenarkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak Penggugat selaku kuasa hukum yang telah lama berpraktek sebagai Advokat dan Pengacara dan telah mempermalukan Penggugat karena sejak Penggugat menjadi Advokat dan Pengacara baru kali ini ditolak Tergugat I sampai dengan tergugat VII, padahal berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU nomor 16 tentang Bantuan Hukum dengan tegas menyatakan antara lain: Bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan

Hal 46 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum"

Bahwa Penggugat telah gagal memahami hierarki peraturan perundang-undangan dan rezim hukum yang ada di Indonesia dengan membenturkan PMK No.229/PMK.03/2014 kepada Undang-Undang Advokat. Hal ini sangatlah tidak tepat mengingat PMK No.229/PMK.03/2014 bukanlah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Advokat.

4. Apabila Penggugat ingin menyanggah aturan dalam PMK No.229/PMK.03/2014, maka sudah seharusnya Penggugat menyanggah Undang-Undang Advokat dengan UU KUP. PMK No.229/PMK.03/2014 sebagai ketentuan pelaksana yang telah diamanatkan oleh UU KUP merupakan bentuk *lex specialis* dalam mengatur Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa di bidang perpajakan.
5. Bahwa dalil tersebut juga telah menunjukkan betapa Penggugat sebagai Advokat tidak menghormati peraturan dan keberadaan profesi lain. Penggugat sebagai Advokat yang katanya profesional seharusnya telah mengetahui dan mengerti bahwa untuk menjadi kuasa pajak harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK No.229/PMK.03/2014.
6. Bahwa setiap profesi telah diatur dan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan, termasuk profesi Advokat dan profesi Konsultan Pajak. setiap profesi memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda-beda sehingga tidak semua orang dapat melakukan beberapa profesi sekaligus dalam satu waktu. Pada dasarnya tentu saja dimungkinkan apabila seorang advokat memiliki sertifikasi sebagai advokat sekaligus sebagai konsultan pajak, apabila advokat tersebut juga ingin berprofesi sebagai konsultan pajak, sepanjang advokat tersebut memenuhi persyaratan sebagai kuasa perpajakan wajib pajak sesuai PMK No.229/PMK.03/2014.
7. Bahwa PMK No.229/PMK.03/2014 tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Advokat karena memang Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 bukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Advokat. Pengaturan tentang suatu profesi merupakan

Hal 47 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



hal yang lazim dilakukan seperti misalnya seorang advokat tidak otomatis menjadi advokat dalam bursa efek, advokat harus mendapat ijin terlebih dahulu dari bursa efek. hal itu tetap berlaku meskipun pengaturan mengenai kewajiban menjadi kuasa di bursa efek mengatur perijinannya tersendiri dan tidak dapat dikatakan telah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat.

8. Selanjutnya Para Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan menjadi kuasa Wajib Pajak karena bukan merupakan seorang Konsultan Pajak sesuai yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 229/PMK.03/2014, atau setidaknya Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 229/PMK.03/2014.
9. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP Pratama Bantul nomor S-346/PJ.011/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Data Konsultan Pajak pada intinya menyampaikan bahwa sesuai dengan database Konsultan Pajak yang berada di bagian Organisasi dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa **Penggugat tidak terdaftar sebagai Konsultan Pajak.**
10. Bahwa Drs. Mochamad Soebakir dan Fidel S,E selaku ketua umum dan sekretaris umum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam suratnya nomor S-086/PP.IKPI/IV/2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: permintaan keterangan, menyatakan bahwa **Penggugat tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak.**
11. Bahwa keliru dan mengada-ada dalil Penggugat pada halaman 6 angka 8.1 Gugatannya tentang legalitas kuasa hukum yang menyatakan:
“dalam pemeriksaan dan dialog selama rapat dikantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII antara lain Tergugat I mempersoalkan tentang kehadiran Penggugat yang dikatakan tidak dapat mewakili Wajib Pajak karena bukan sebagai konsultan pajak.
*pada waktu itu **Penggugat menyerahkan izin praktek dari pengadilan pajak selaku kuasa hukum dan surat keputusan pengangkatan Penggugat selaku kuasa hukum pengadilan pajak.**”*
12. Bahwa tentu saja dalil penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak *nyambung* sama sekali. Penggugat bermaksud untuk menjadi kuasa

Hal 48 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



pajak di **kantor pelayanan pajak** tapi menunjukkan ijin beracara di **Pengadilan Pajak. INI TIDAK NYAMBUNG.**

13. Bahwa tindakan Tergugat I s.d. Tergugat VII yang mempertanyakan legalitas kuasa hukum Penggugat adalah dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan sekaligus untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak dan tentu saja tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa Penggugat juga sangat keliru dalam memahami perbedaan izin kuasa hukum pengadilan pajak dengan izin praktik konsultan pajak. Ketentuan mengenai kuasa hukum pengadilan pajak berbedadengan ketentuan mengenai konsultanpajak. Ketentuan mengenai kuasa hukum pengadilan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (PMK No. 61 Tahun 2012).
15. Bahwa PMK No. 61 Tahun 2012 memberikan definisi mengenai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 PMK No. 61 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa **untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.**”*

16. Bahwa proses pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak atas nama Delia Murwihartini yang dilaksanakan oleh Para Tergugat bukan merupakan perkara di Pengadilan Pajak, sehingga tidak termasuk ruang lingkup hak dari pemilik Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
17. Bahwa selain berbeda antara Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dengan Konsultan Pajak, **masa berlaku izin kuasa hukum Penggugat dari Pengadilan Pajak pun telah berakhir.** Sekretaris Pengadilan Pajak dalam suratnya nomor S-218/SP/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Penjelasan Tentang Izin Kuasa Hukum Atas Nama Saudara Petrus Bala Pattyona, SH.,MH menyatakan bahwa **izin kuasa hukum atas nama saudara Petrus Bala Pattyona, SH.,MH yang didasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-302/PP/IKH/2009**

Hal 49 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



tanggal 30 Juni 2009 (KEP-302), masa berlakunya sesuai Diktum KEEMPAT KEP-302 telah berakhir terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 dan belum diperpanjang.

Bahwa sebagaimana penjelasan Para Tergugat di atas, maka terbukti secara terang dan nyata bahwa Penggugat bukanlah seorang konsultan pajak sehingga tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki kapasitas sebagai seorang kuasa dari Wajib Pajak sesuai dengan PMK 229/PMK.03/2014.

C. Tentang Menjalankan Peraturan Perundang-undangan Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Penggugat tidak memahami konsep dasar mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat secara sesukahatinya mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum tanpa mengerti terlebih dahulu unsur-unsur suatu tindakan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidak dapat menjelaskan tindakan mana yang digugatnya sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Ada Suatu Perbuatan.*
 2. *Perbuatan Itu Melawan Hukum.*
 3. *Ada Kesalahan dari Pelaku.*
 4. *Ada Kerugian Korban.*
 5. *Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.* “
3. Bahwa unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
 4. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, tidak dapat menjelaskan secara rinci kerugian Penggugat serta tidak dapat menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Lebih jauh lagi, Penggugat

Hal 50 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



dalam serangkaian gugatannya pada dasarnya tidak pernah mendalilkan adanya prosedur pemeriksaan yang dilanggar oleh Para Tergugat.

5. Bahwa terkait pemeriksaan pajak yang dipermasalahkan oleh Penggugat, Para tergugat dapat menjelaskan bahwa pemeriksaan kewajiban perpajakan merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

6. Bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan dalam uraian-uraian sebelumnya yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat dalam melaksanakan pemeriksaan, maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat jelas tidak terbukti.
7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa tindakan yang dilakukan Para Tergugat adalah tindakan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Angka 4.4. halaman 4:

Bahwa adapun maksud Tergugat I selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan...

Angka 4.5 halaman 4:

Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (Tergugat I) tujuannya untuk pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2011...

8. Bahwa Penggugat dalam dalil posita Gugatannya juga mempermasalahkan legalitas kuasa hukum penggugat. pada angka 8.1:

“dalam pemeriksaan dan dialog selama rapat dikantor Tergugat I sampai dengan Tergugat VII antara lain Tergugat I mempersoalkan

Hal 51 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



*tentang kehadiran Penggugat yang dikatakan tidak dapat mewakili
Wajib Pajak **karena bukan sebagai konsultan pajak.***

9. Bahwa merupakan suatu hal yang lazim dimana terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan suatu profesi. Setiap orang dalam menjalankan suatu profesi, haruslah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menaungi eksistensi profesi tersebut, misalnya advokat tunduk pada UU Advokat, Undang-Undang Praktik Dokter, dll.

Setiap profesi juga pasti diatur mengenai hak dan kewajibannya. Misalkan profesi Notaris, meskipun seseorang telah diangkat menjadi notaris dan telah memiliki Surat keputusan pengangkatan selaku notaris dan Berita Acara sumpah notaris dikeluarkan Menteri hukum dan HAM, bukan berarti notaris ini dapat membuat semua akta, seperti akta-akta tanah.

Hal ini dikarenakan peraturannya saja telah berbeda. Profesi Notaris diatur dalam **Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** sedangkan ketentuan mengenai PPAT diatur dalam **PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.**

10. Bahwa tindakan Tergugat I sampai Tergugat VII yang mempertanyakan legalitas kuasa hukum Penggugat adalah dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan sekaligus untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak yang tentu saja tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa tindakan penolakan yang dilakukan Para Tergugat adalah karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK 229/PMK.03/2014, atau setidaknya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 229/PMK.03/2014.

Bahwaberdasarkan uraian yang disampaikan Para Tergugat, terbukti dengan sangat terang dan jelas bahwa tidak terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum.

D. Tentang Pemeriksaan Pajak

Hal 52 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



1. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada angka 5 posita Gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

*“...,bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat I menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan klien Penggugat adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan sifatnya random, acak sehingga pada waktu itu (tanggal 16 Maret 2015) Penggugat menanyakan apakah ada bukti-bukti permulaan yang mengarah dalam hal-hal yang dapat dikategorikan bahwa klien Penggugat tidak patuh dalam hal pajak pribadi dan apabila sifatnya hanya random, acak maka **tidak ada keharusan pemeriksaan terhadap klien Penggugat;***

2. Bahwa Perlu Para Tergugat jelaskan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem *self assessment*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan :

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”.

3. Namun demikian, terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Bahwa mengenai ketentuan yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan tersebut, salah satunya diatur dalam Pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Hal 53 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Oleh karena itu, tindakan pemeriksaan pajak yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sesungguhnya merupakan tindakan menjalankan kewenangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa selain itu, sangat keliru dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada angka 4.7 posita Gugatannya yang menyatakan:

“bahwa cara-cara kerja Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang tidak mengenal lelah mengejar kepatuhan klien Penggugat sebagai Wajib Pajak pribadi perlu dipertanyakan karena apakah terhadap semua Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.”

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tugas dan tanggung jawab mulia sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Seharusnya Penggugat berbangga hati saat Penggugat mengetahui bahwa pegawai pajak bekerja dan berjuang sepenuh hati demi mengamankan penerimaan negara.

E. Tentang Petugas Pajak yang dalam menjalankan tugasnya, tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana

1. Bahwa seperti yang Para Tergugat uraikan sebelumnya, Penggugat telah keliru dalam menentukan Subjek Hukum Para Tergugat karena Penggugat telah tanpa dasar menggugat Para Tergugat secara pribadi saat bertindak sebagai pejabat administrasi.
2. Bahwa Para Tergugat seharusnya tidak dapat digugat baik secara jabatan karena Para Tergugat hanya semata-mata melaksanakan tugas dan perintah jabatan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Bahwa Hal ini sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 36A ayat (5) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada

Hal 54 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penjelasan:

“Pegawai Pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/ atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme.”

4. Bahwa iktikad baik Para Tergugat diakui secara terang dan nyata oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya:

Angka 4.4. halaman 4:

“Bahwa adapun maksud Tergugat I selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan...”

Angka 4.5 halaman 4:

“Bahwa pada Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (Tergugat I) tujuannya untuk pemeriksaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2011,...”

Angka 4.6. halaman 4:

“Bahwa apabila maksud dan tujuan yang baik dari KPP Pratama Bantul (Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya) untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan...”

5. Bahwa sangat terang dan jelas tindakan yang dilakukan Para Tergugat merupakan kewenangan melakukan pemeriksaan yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa selain itu, Para Tergugat telah melakukan tugas sebagai petugas pajak yang beritikad baik dengan mematuhi prosedur dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang juga telah diakui secara nyata oleh Penggugat dalam Gugatannya.

F. Tentang Permintaan Ganti Kerugian yang Tidak Beralasan dan Berdasar Hukum

Hal 55 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



1. Bahwa sangat tidak beralasan dan berdasar hukum dalil Penggugat mengenai ganti kerugian pada halaman 17 angka 12 posita Gugatannya yang menyatakan:

Bahwa Penolakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII terhadap Penggugat untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada klien Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat baik moril dan materil yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Kerugian Materil*

Klien penggugat tidak menggunakan jasa hukum Penggugat yang berakibat Penggugat tidak menerima honorarium sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

...biaya akomodasi berupa hotel. Tiket Jakarta-Yogyakarta PP untuk mengajukan Gugatan ini diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan demikian kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

- 2) *Kerugian Immateriil*

..., maka Penggugat tetapkan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

2. Sebagaimana telah Para Tergugat uraikan sebelumnya bahwa dalam perkara **tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil apalagi kerugian immateriil, maka tidak beralasan dan tidak berdasar apabila kepada Para Tergugat dibebankan pembayaran kerugian dan biaya perkara kepada Penggugat.
3. Tindakan Klien penggugat tidak menggunakan jasa hukum Penggugat yang berakibat Penggugat tidak menerima honorarium merupakan sengketa antara Penggugat dengan kliennya, sehingga tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat sebagai pribadi. adalah hak Penggugat untuk menggugat mantan klien penggugat.
4. Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan kembali bahwa alasan penolakan Para Tergugat terhadap Penggugat bukanlah terkait dengan permasalahan

Hal 56 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Bt



suka atau tidak suka, melainkan bahwa karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa wajib pajak sesuai dengan ketentuan PMK No.229/PMK.03/2014 Tanggal 31 Desember 2014.

G. Tentang Permintaan Sita Jaminan yang tidak terang dan tidak jelas

1. Bahwa sangat tidak rinci dan tidak jelas dalil Penggugat mengenai sita jaminan pada angka 22 posita Gugatannya yang menyatakan:

“Bahwa dalam rangka pemenuhan pembayaran ganti rugi materiil maupun immateriil terhadap Penggugat, maka mohon Majelis Hakim meletakkan Conservatoir Beslaag(sita jaminan) terhadap aset-aset pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII sehingga pada waktunya dapat dijual Lelang untuk dapat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

22.1. Tergugat I : Tanah dan Bangunan di Jl. Nandan Rt.007/Rw.039, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;

22.2 Tergugat II : Tanah dan Bangunan di Karang Nangko rt.03/Rw.19 No.363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta ;

22.3 Tergugat III : Tanah dan Bangunan di Jl. Sambi Legi Rt.07/Rw.55 No. 49, Sleman, Yogyakarta;

22.4 Tergugat IV : Tanah dan Bangunan di Jl. Manding Kidul Rt.07 kel. Trirenggo, Bantul, Yogyakarta;

22.5 Tergugat V : Tanah dan Bangunan di Jl. Dayu Rt.01 No. 11, Gading Sari, Sandenan, Bantul, Yogyakarta;

22.6 Tergugat VI : Tanah dan Bangunan di Perumahan Palem Hijau No.123, Jl. Godean Km.7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta;

22.7 Tergugat VII : Datanya akan disusulkan dalam surat permohonan tersendiri;

Selain dari pada itu mohon rekening-rekening pribadi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada Bank-bank yang akan diberitahukan kemudian, mohon diblokir dan disisihkan sebagian uangnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.”

2. Bahwa Yahya Harahap , S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 291 menyatakan bahwa:



Selain dirinci dan disebut satu persatu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi:

- *Jenis atau bentuk barang,*
- *letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup dengan menyebutkan nomor sertifikat yang tercantum didalamnya,*
- *nama pemiliknya*
- *jika mengenai rekening, disebutkan nomor rekeningnya, pemiliknya dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,*
- *jika saham, disebutkan nama pemegangnya, jumlahnya dan tempat terdaftarnya.*

Permintaan sita yang tidak menyebutkan secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.

3. Bahwa Penggugat tidak mampu mendalilkan secara jelas dan rinci objek yang diajukan sita jaminan dengan tidak dapat menunjukkan secara jelas informasi atas tanah dan bangunan yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat dengan menunjukkan atau menyebutkan nomor dan nama sertifikat tanah dan bangunan yang dimintakan sita jaminan.
4. Bahwa lebih lanjut, Para Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan rekening-rekening apa, nomor rekening berapa dan bank-bank apa yang dimaksud oleh Penggugat serta tidak jelas siapa yang diperintahkan untuk melakukan pemblokiran atas rekening-rekening yang tidak jelas juga objeknya.
5. Bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat kepada majelis hakim untuk menyatakan sah sita jaminan atas harta Para Tergugat adalah permintaan yang kabur karena tidak menyebutkan secara jelas identitas objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk menolaknya permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa oleh karena terbukti tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak beralasan Gugatan Penggugat di atas, maka untuk selanjutnya Para Tergugat mengajukan

Hal 58 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Gugatan Rekonvensi dengan dasar hukum, alasan hukum dan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Para Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik atau Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat Rekonvensi.

POSITA GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas mulia untuk mengamankan penerimaan negara. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara telah terganggu oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

3. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Ada Suatu Perbuatan.*
2. *Perbuatan Itu Melawan Hukum.*
3. *Ada Kesalahan dari Pelaku.*
4. *Ada Kerugian Korban.*
5. *Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.”*

4. **Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah sangat dirugikan oleh perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonveisi yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tidak bertanggungjawab yang paling nyata dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah gugatan Tergugat Rekonvensi kepada diri pribadi Para Penggugat Rekonvensi atas tindakannya sebagai**

Hal 59 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



pegawai negeri/pejabat administrasi di lingkungan Kementerian Keuangan RI.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggugat Para Tergugat Rekonvensi dengan dalil telah menolak Tergugat Rekonvensi sebagai kuasa pajak seorang Wajib Pajak, padahal nyata-nyata Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat.
6. Bahwa tindakan Para Penggugat Rekonvensi yang mempertanyakan legalitas kuasa hukum Tergugat Rekonvensi adalah dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan sekaligus untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak dan tentu saja tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi dapat dikatakan telah memaksa Para Penggugat Rekonvensi untuk melanggar ketentuan PMK 229/PMK.03/2014 yang nyata-nyata telah mengatur syarat untuk menjadi kuasa pajak.
7. **Tentang kapasitas Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa sesuai yang telah diatur dalam PMK 229/PMK.03/2014.**
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yaitu bertindak seolah-olah sebagai kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan padahal Penggugat nyata-nyata tidak memiliki kapasitas dan tidak memenuhi syarat menjadi kuasa Wajib Pajak.
 - b. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut melawan hukum dengan alasan perbuatan Tergugat rekonvensi bertentangan dengan PMK 229/PMK.03/2014 yang telah mengatur persyaratan menjadi kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu:

Pasal 1 ayat (1)

Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2 ayat (4)

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *konsultan pajak; dan*

Hal 60 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



b. *karyawan Wajib Pajak.*

Pasal 5 ayat (1)

*Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila **memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.***

Pasal 6 ayat (1)

*Padasaatmelaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang **dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.***

Pasal 6 ayat (2)

Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. *fotokopi **kartu izin praktik konsultan pajak;***
- b. *surat **pernyataan sebagai konsultan pajak;***
- c. *fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan*
- d. *fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.*

Pasal 8

*Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 **dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.***

- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan berusaha



bertindak sebagai seorang kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan padahal Tergugat Rekonvensi nyata-nyata tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa sesuai yang telah diatur dalam PMK 229/PMK.03/2014.

- d. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang bertindak seolah-olah memiliki kapasitas sebagai konsultan pajak dan menyatakan Tergugat Rekonvensi pernah menyerahkan surat keputusan pengangkatan selaku konsultan pajak/kuasa hukummerupakan suatu dalil yang mengada-ada.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP Pratama Bantul Nomor S-346/PJ.011/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Data Konsultan Pajak pada intinya menyampaikan bahwa sesuai dengan database Konsultan Pajak pada intinya menyampaikan bahwa sesuai dengan database Konsultan Pajak yang berada di bagian Organisasi dan Tatalaksana, diketahui bahwa Penggugat tidak terdaftar sebagai Konsultan Pajak.
- f. Bahwa Drs. Mochamad Soebakir dan Fidel S,E selaku ketua umum dan sekretaris umum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam suratnya Nomor S-086/PP.IKPI/IV/2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: Permintaan Keterangan, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak.

8. Tentang Tindakan Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi pemeriksaan pajak.

- a. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak atas nama Delia Murwihartini berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00041/WPJ.23/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 05 Februari 2015.
- b. Bahwa terkait pemeriksaan kepatuhan perpajakan tersebut, Tergugat Rekonvensi mendatangi dan menyurati Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi mendudukkan diri sebagai kuasa Wajib Pajak atas nama Delia Murwihartini dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Delia Murwihartini.
- c. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat Rekonvensi sebelumnya, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan PMK 229/PMK.03/2014.

Hal 62 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- d. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah menerangkan kepada Tergugat rekonvensi tentang hak dan kewajiban serta syarat menjadi kuasa Wajib Pajak. Hal ini telah diterangkan secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat dan kapasitas sebagai kuasa Wajib Pajak PMK 229/PMK.03/2014 tetapi bersikeras untuk tetap dinyatakan berhak menjadi kuasa Wajib Pajak.
- e. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai petugas negara yang harus melaksanakan tugas dengan prinsip kehati-hatian tentulah haruslah memastikan terlebih dahulu apakah benar Tergugat Rekonvensi mendapat kuasa khusus dari Wajib Pajak dan apakah Tergugat Rekonvensi memenuhi persyaratan untuk menjadi kuasa dalam mewakili Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- f. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah meminta Tergugat Rekonvensi untuk memperlihatkan dokumen kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PMK 229/PMK.03/2014 agar dapat diakui sebagai kuasa Wajib Pajak, tetapi tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi.
- g. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk dinyatakan memiliki kapasitas sebagai kuasa Wajib Pajak dengan menunjukkan sertifikat yang tidak memiliki hubungan dengan syarat menjadi kuasa Wajib Pajak yaitu izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang ternyata telah habis masa berlakunya.
- h. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PMK 229/PMK.03/2014, Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat menjadi kuasa Wajib Pajak dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.
- i. Bahwa meskipun Para Penggugat Rekonvensi telah berusaha menjelaskan, Tergugat Rekonvensi tetap berusaha menghalang-halangi pelaksanaan pemeriksaan perpajakan Wajib Pajak atas nama Delia Murwihartini dengan tetap berusaha bertemu dan menyurati Para Penggugat Rekonvensi terkait pemeriksaan yang sedang dilaksanakan Para Penggugat Rekonvensi.
- j. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat mengganggu Para Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Tenaga dan pikiran Para Penggugat Rekonvensi yang seharusnya tercurah untuk melaksanakan tugas negara menjadi terhambat oleh tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak henti-henti memaksa

Hal 63 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Para PenggugatRekonvensi untuk mengakui TergugatRekonvensi memiliki kapasitas menjadi kuasa Wajib Pajak.

- k. Bahwa puncak dari tindakan menghalang-halangi pemeriksaan yang dilakukan TergugatRekonvensi adalah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap Para PenggugatRekonvensi sebagai abdi negara dan sebagai pribadi. Bahwa dengan adanya Gugatanyang tidak berdasar ini, sangatlah menyita waktu dan pikiran ParaPenggugatRekonvensi, terlebih lagi Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi para Penggugat Rekonvensi. Bahwa permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi para Penggugat Rekonvensi merupakan permohonan yang sangat tidak berdasar karena diajukan sebagai dampak atas tindakan dari para Penggugat Rekonvensi menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan itikad baik.

9. Tentang Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mencemarkan nama baik ParaPenggugat Rekonvensi

- a. Bahwa Para Penggugat Rekonvensimerupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam bermasyarakat. Bahwa kenyamanan Para Penggugat Rekonvensidalam lingkungan bermasyarakatyang selama ini berjalan dengan baik telah terusik oleh tindakan TergugatRekonvensi yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar hukum.
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengirimkan surat kepada Pejabat Masyarakat di lingkungan Para penggugat Rekonvensi yaitu:
- a. Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 03/Rw 19 kelurahan Gamping, Ketua Rw 19 kelurahan Gamping, Lurah Desa Gamping dan Camat Gamping Patukan;
- b. Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 007/Rw 039 kelurahan Sariharjo, Ketua Rw 039 kelurahan Sariharjo, Lurah Desa Sariharjo dan Camat Ngagilk.

Hal 64 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- c. Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 07 kelurahan Trirengo, Lurah Desa Trirengo dan Camat Bantul.
- d. Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 07 kelurahan Maguwoharjo, Ketua Rw 55 kelurahan Maguwoharjo, Lurah Desa Maguwoharjo dan Camat Depok.
- c. Bahwa inti dari surat Tergugat Rekonvensi adalah bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini mengajukan Gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bantul dalam dua perkara yaitu Nomor perkara 28/Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 17 Mei 2016 dan 39/Pdt.G/2016/PN.Btl tertanggal 20 Juli 2016 dan telah mengajukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mengancam para pejabat lingkungan setempat akan melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata apabila menjadi saksi atau memberikan keterangan atau rekomendasi apabila tanah dan bangunan Para Penggugat Rekonvensi dijual.
- d. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengaitkan nama Para Penggugat Rekonvensi dalam surat yang sangat tidak berdasar tersebut tersebut nyata-nyata telah sangat merugikan dan telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa atas surat yang bernada ancaman tersebut membuat seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu tindakan kejahatan.
- e. Bahwa tentu saja tindakan Tergugat Rekonvensi sangatlah tidak berdasar karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk melakukan pemaksaan bahkan ancaman kepada warga lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, apalagi menyebarkan suatu berita yang tidak benar kepada masyarakat yang merugikan Para Tergugat Rekonvensi.
- f. Bahwa sita jaminan yang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonvensi hanyalah permohonan yang belum diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memaksa masyarakat di lingkungan Para Penggugat Rekonvensi untuk tidak menjadi saksi atau memberikan keterangan atau

Hal 65 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



rekomendasi apabila tanah dan bangunan Para Penggugat Rekonvensi dijual.

g. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi telah merusak citra baik nama Para Penggugat Rekonvensi yang selama ini bekerja sebagai abdi negara. Para Penggugat Rekonvensi merasa sangat resah dan sangat dirugikan. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah membuat resah keluarga Para Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan surat-surat tersebut di atas. Keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang semula tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat Rekonvensi menjadi resah dan hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman keluarga Para Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan atas tindakan Tergugat Rekonvensi dan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dan memulihkan nama baik dari Para Penggugat Rekonvensi.

11. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yang timbul karena surat-surat dari Tergugat Rekonvensi terhadap pejabat masyarakat untuk tidak menjadi saksi dalam hal jual beli Tanah dan Bangunan Para Penggugat Rekonvensi menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan penjualan aset Para Penggugat sehingga mengalami kerugian materiil. Besarnya seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).

b. Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi serta sangat memperlakukan Para Penggugat Rekonvensi yang kesemuanya tersebut tidak dapat dinilai dengan uang tetapi sebagai patokan untuk membayar kerugian immateriil maka Para Penggugat Rekonvensi menetapkan keseluruhan nilainya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

12. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari

Hal 66 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan GugatanPenggugat salah dalam menetapkan pihak yang digugat;
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat;
4. Menyatakan GugatanPenggugat kabur dan tidak jelas;
5. Menyatakan GugatanPenggugat kurang pihak;
6. Menyatakan GugatanPenggugat diajukan dengan niat dan tujuan licik;
7. Menyatakan GugatanPenggugat tidak memiliki dasar hukum; dan
8. Menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legalitas sebagai kuasa mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
3. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat;
4. Menolak sita jaminan terhadap:
 - 1) Tergugat I : Tanah dan Bangunan di Jl. Nandan Rt.007/Rw.039, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;
 - 2) Tergugat II : Tanah dan Bangunan di Karang Nangko rt.03/Rw.19 No.363 B, Gamping, Sleman, Yogyakarta ;
 - 3) Tergugat III : Tanah dan Bangunan di Jl. Sambu Legi Rt.07/Rw.55 No. 49, Sleman, Yogyakarta;
 - 4) Tergugat IV : Tanah dan Bangunan di Jl. Manding Kidul Rt.07 kel. Tirirenggo, Bantul, Yogyakarta;

Hal 67 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- 5) Tergugat V : Tanah dan Bangunan di Jl. Dayu Rt.01 No. 11, Gading Sari, Sandenan, Bantul, Yogyakarta;
 - 6) Tergugat VI : Tanah dan Bangunan di Perumahan Palem Hijau No.123, Jl. Godean Km.7, Sidomoyo, Godean, Bantul, Yogyakarta; dan
 - 7) Tergugat VII;
5. Menolak pemblokiran rekening-rekening Para Tergugat;
 6. Menolak tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan RI;
 7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSII

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 18.300.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp7.300.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam 2 (dua) surat kabar nasional dan 2 (dua) surat kabar lokal sebanyak 7 (tujuh) hari berturut-turut;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan surat klarifikasi dan pemulihan nama baik Para Penggugat Rekonvensi kepada:
 - a. Ketua Rt 03/Rw 19 kelurahan Gamping, Ketua Rw 19 kelurahan Gamping, Lurah Desa Gamping dan Camat Gamping Patukan;
 - b. Kepada Ketua Rt 007/Rw 039 kelurahan Sariharjo, Ketua Rw 039 kelurahan Sariharjo, Lurah Desa Sariharjo dan Camat Ngaglik;
 - c. Ketua Rt 07 kelurahan Tirengo, Lurah Desa Tirengo dan Camat Bantul; dan
 - d. Ketua Rt 07 kelurahan Maguwoharjo, Ketua Rw 55 kelurahan Maguwoharjo, Lurah Desa Maguwoharjo dan Camat Depok.

Hal 68 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 10 OKTOBER 2016,

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Oktober 2016.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat adalah seorang Advokat dan Pengacara yang telah berpraktek sebagai Pengacara sejak tahun 1987 berupa :
 - 1a. Berita Acara tanggal 26 Maret 1987, Pengangkatan sebagai Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. **(Diberi tanda P-1a)**;
 - 1b. Kartu Tanda Pengenal sebagai Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. **(Diberi tanda P-1b)**;
 - 1c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/Sekr/Pan/XI/1988/PNJS tanggal 17 November 1988 bahwa Penggugat telah berpraktek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. **(Diberi tanda P-1c)**;
2. Fotocopy dari Asli Surat-surat Keputusan Pejabat yang berwenang bahwa Penggugat diangkat berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yaitu :
 - 2a. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.PANKUM 143.671.1990 tanggal 6 Maret 1990. **(Diberi tanda P-2a)**;
 - 2b. Berita Acara Pengangkatan Penggugat sebagai Pengacara dari Pengadilan Tinggi Jakarta No. PTJ.UM.143.671.1996 tanggal 6 Maret 1990. **(Diberi tanda P-2b)**;

Hal 69 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- 2c. Berita Acara Pengangkatan Penggugat sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. D.29.KP.04.03 tahun 1993 tanggal 30 Agustus 1993. **(Diberi tanda P-2c);**
3. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat sebagai Advokat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum HAM No. D.29 KP 04.13 tahun 1993 tanggal 11 Agustus 1993. **(Diberi tanda P-3);**
4. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat sebagai Kurator & Pengurus diangkat berdasarkan SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 tanggal 8 Mei 2008 dan telah didaftarkan kembali dengan No. AHU.AH.04.03.85 tanggal 5 September 2013. **(Diberi tanda P-4);**
5. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak No. KEP.302/PP/IKH/2009 tanggal 30 Juni 2009. **(Diberi tanda P-5);**
6. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat sebagai Legal Auditor berdasarkan Keputusan Certified Legal Auditor (CLA) tanggal 2 Juli 2015. **(Diberi tanda P-6);**
7. Fotocopy dari Copy Bukti Klien Penggugat Ny. Dra. Hj. Delia Murwihartini yang telah memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat No. 008/SK.PBP/II/2015 tanggal 20 Februari 2015. **(Diberi tanda P-7);**
8. Fotocopy dari Asli Surat Tergugat VIII kepada Klien Penggugat No. S.BP.07/WPJ.23/BD.0404/2015 tanggal 21 September 2014 tentang Permintaan Peminjaman Dokumen. **(Diberi tanda P-8);**
9. Fotocopy dari Copy Bukti Penggugat telah menyurati Tergugat I sampai dengan Tergugat IV pada tanggal 28 Februari 2015 yang menyampaikan teguran sehubungan dengan cara kerja Para Tergugat yang mengejar-ngejar Klien Penggugat **(Diberi tanda P-9);**
10. Fotocopy dari Copy Bukti Surat Tergugat I tanggal 20 Januari 2015 pada waktu itu selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak memerintahkan staf KPP Bantul (Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain meminta diperlihatkan atau dipinjamkan buku dan dokumen berupa : 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP, 2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 3. Rekening Koran bank, buku tabungan, 4. Perjanjian kontrak kerja, 5. Bukti kepemilikan harta, 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport, 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta

Hal 70 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



(formulir terlampir); 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir), 10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir), 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir), 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan.

(Diberi tanda P-10);

11. Fotocopy dari Copy Bukti Surat Tergugat I tanggal 24 Februari 2015 kepada Klien Penggugat untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang diterbitkan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan antara lain meminta diperlihatkan atau dipinjamkan buku dan dokumen berupa : 1. SPT Tahunan PPh OP beserta lampiran dan SSP, 2. Fotokopi bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, 3. Rekening Koran bank, buku tabungan, 4. Perjanjian kontrak kerja, 5. Bukti kepemilikan harta, 6. SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pasport, 8. Surat Pernyataan Kepemilikan Harta (formulir terlampir); 9. Surat Pernyataan Kartu Kredit (formulir terlampir), 10. Surat Pernyataan Rekening Tabungan, giro, deposito dan sejenisnya (formulir terlampir), 11. Daftar Isian Biaya Hidup (formulir terlampir), 12. Dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan. **(Diberi tanda P-11);**
12. Fotocopy dari Copy Bukti surat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tanggal 27 Maret 2015 dengan No. 007/PPB/PBP/II/2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan cara kerja Staf KPP Bantul dan pemanggilan Klien Penggugat ke Kanwil Pajak Yogyakarta. **(Diberi tanda P-12);**
13. Fotocopy dari Copy Bukti Tergugat I masih meragukan legalitas Penggugat sehingga mengirim Surat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat No. S-18176/WPJ.23/KP.05/2015 tanggal 2 April 2015. **(Diberi tanda P-13);**
14. Fotocopy dari Asli Penggugat telah menyampaikan Tanggapan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 8 April 2015 dengan No. 008/THS/PBP/IV/2015 tanggal 8 April 2015 sehubungan dengan Surat Tergugat I. **(Diberi tanda P-14);**
15. Fotocopy dari Asli Perjanjian Honorarium antara Penggugat dengan Klien Penggugat yang tidak terlaksana secara sempurna karena ulah Para Tergugat yang menolak Penggugat untuk mendampingi Klien Penggugat di KPP Bantul. **(Diberi tanda P-15);**

Hal 71 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari Asli Contoh berita-berita koran yang memberi stigma negatif tentang perilaku Pegawai Direktorat Pajak yang korupsi;
- 16a. Harian Tempo tanggal 5 Maret 2012 : Kasus Dhana Tersangka Korupsi Pajak Terus Diusut. **(Diberi tanda P-16a);**
- 16b. Harian Kompas tanggal 10 April 2013 : KPK Tangkap Pegawai Pajak dan Pengusaha. **(Diberi tanda P-16b);**
- 16c. Harian Kontan tanggal 16 Mei 2013 : Daftar Pegawai Pajak yang ditangkap KPK. **(Diberi tanda P-16c);**
17. Fotocopy dari Copy Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Advokat khusus pasal 14 sampai dengan Pasal 21 tentang Hak dan Kewajiban Advokat dan Honorarium Advokat yang pada pokoknya bahwa Advokat termasuk Penggugat berhak mendampingi/membela siapapun dalam perkara apapun berdasarkan Undang-undang Advokat. **(Diberi tanda P-17);**
18. Fotocopy dari Asli Tanda terima SPT tahunan asli pertama tahun 2010 tanggal 30 Maret 2011 dan pembetulan tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2014. **(Diberi tanda P-18);**
19. Fotocopy dari Asli Tanda terima SPT Tahunan asli pertama tahun 2011 tanggal 22 Maret 2012 dan pembetulan tahun 2011 tanggal 21 Agustus 2014 **(Diberi tanda P-19);**
20. Fotocopy dari Asli Tanda terima SPT Tahunan asli pertama tahun 2012 tanggal 26 Maret 2013 dan pembetulan tahun 2012 tanggal 21 Agustus 2014 **(Diberi tanda P-20);**
Bukti P-18, P-19, P-20 tentang SPT Tahunan Klien Penggugat yang dijadikan dasar Para Tergugat untuk menguji kepatuhan pajak hanyalah akal-akalan saja karena Klien Penggugat telah melakukan pembetulan dan telah diterima oleh Para Tergugat.
21. Fotocopy dari Copy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Final Pasal 23/26 dari Para Tergugat tertanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 1.341.811.922,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah). Terhadap Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Final tersebut telah dilaksanakan oleh Klien Penggugat. **(Diberi tanda P-21);**
22. Fotocopy dari Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-478/WPJ.23/BD.06/2015 tanggal 31 Maret 2015 atas nama PT. Rumindo Pratama tentang pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan

Hal 72 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Pajak Kurang Bayar karena permohonan wajib pajak senilai Rp. 241.526.146,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Klien Penggugat yang merupakan Direktur PT. Rumindo Pratama selama menjalankan usahanya selalu diganggu-ganggu oleh Para Tergugat. **(Diberi tanda P-22);**

23. Fotocopy dari Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-479/WPJ.23/BD.06/2015 tanggal 31 Maret 2015 atas nama PT. Rumindo Pratama tentang pengurangan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena permohonan wajib pajak senilai Rp. 1.300.813.271,- (satu milyar tiga ratus juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Klien Penggugat yang merupakan Direktur PT. Rumindo Pratama selama menjalankan usahanya selalu diganggu-ganggu oleh Para Tergugat. **(Diberi tanda P-23);**
24. Fotocopy dari Asli Salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. PUT.41806/PP/MII/15/2012 tertanggal 26 Desember 2012 sehubungan dengan gangguan dan rongrongan dari Para Tergugat selama Klien Penggugat menjalankan usahanya karena Para Tergugat menerbitkan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 25/29 tahun 2007 No. 00006/206/07/54309 tanggal 30 Maret 2009 senilai Rp. 661.382.821.000,- (enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dan atas keberatan Klien Penggugat tersebut Pengadilan Pajak menyatakan Klien Penggugat hanya ada kekurangan bayar sebesar Rp. 140.331.108,- (seratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah). **(Diberi tanda P-24);**
25. Fotocopy dari Asli Tiket Jakarta – Yogyakarta - Jakarta tanggal 23 April 2015 sebesar Rp. 543.200,- (lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan sebesar Rp. 679.100,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah). Tidak termasuk biaya hotel. (Diberi tanda P-25);
26. Fotocopy dari Asli Invoice Hotel The 101 tanggal 27-28 April 2015 sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan Tiket Yogyakarta – Jakarta tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 890.300,- (delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah). (Diberi tanda P-26);
27. Fotocopy dari Asli Tiket Jakarta - Yogyakarta – Jakarta tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 1.093.800,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); dan Invoice Hotel The 101 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (Diberi tanda P-27);

Hal 73 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



28. Fotocopy dari Copy Tiket Jakarta - Yogyakarta – Jakarta tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp. 1.118.800,- (satu juta seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah); dan Invoice Hotel The 101 tanggal 8 - 9 Juni 2015 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Diberi tanda P-28);
29. Fotocopy dari Copy Tiket Jakarta - Yogyakarta – Jakarta tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan Invoice Hotel The 101 tanggal 15 - 16 Juni 2015 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). (Diberi tanda P-29);
30. Fotocopy dari Copy Putusan Pengadilan Pajak No. Put.41304/PP/M.11/12/2012 tanggal 8 November 2012 dimana sebelumnya Penggugat menuntut kekurangan bayar pada Klien Penggugat sebesar Rp. 340.043.638,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Klien Penggugat tidak ada kekurangan bayar. Upaya-upaya licik Para Tergugat ternyata oleh Pengadilan Pajak dinyatakan tidak terbukti karena Klien Penggugat telah sangat patuh dalam hal pembayaran pajak. (Diberi tanda P-30);
31. Fotocopy dari Copy Putusan Pengadilan Pajak No. Put.41306/PP/M.11/12/2012 tanggal 8 November 2012 dimana sebelumnya Penggugat menuntut kekurangan bayar pada Klien Penggugat sebesar Rp. 120.586.546,- (seratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Klien Penggugat tidak ada kekurangan bayar. Upaya-upaya licik Para Tergugat ternyata oleh Pengadilan Pajak dinyatakan tidak terbukti karena Klien Penggugat telah sangat patuh dalam hal pembayaran pajak. (Diberi tanda P-31);
32. Fotocopy dari Asli Bukti Kwitansi Pembayaran Biaya Perkara/Pendaftaran Gugatan No. 28/Pdt.G/2016/PN. Btl tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). (Diberi tanda P-32);
33. Fotocopy dari Asli Kwitansi Pembayaran Biaya Perkara/Pendaftaran Gugatan No. 287/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 28 April 2015 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). (Diberi tanda P-33);
34. Fotocopy dari Asli Putusan Perkara No. 28/Pdt.G/2015/PN. Btl tanggal 8 Desember 2015 yaitu Gugatan antara Penggugat melawan Para Tergugat dan Putusan menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat. (Diberi tanda P-34);

Hal 74 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



35. Fotocopy dari Asli Bukti Penggugat memiliki Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak karena selain telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pajak dan memiliki Sertifikat Perpajakan Setara Brevet A-B, angkatan XX yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari tanggal 10 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 dengan nomor Sertifikat 032/LPLIH Perpajakan/IV/2009. (Diberi tanda P-35);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-17, P-21, P-22, P-23, P-28, P-29, P-30, P-31, yang merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah di sumpah sesuai dengan agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NINA WIDARYATUN :

- Bahwa Saksi adalah salah satu pegawai dari Ibu Delia Murwihartini yang bekerja pada di PT. Dowa tahun 2008 yang sebelumnya bekerja pada PT. Rumindo Pratama Jaya, sejak tahun 1994 ;
- Bahwa jabatan terakhir saksi di PT. Rumindo Pratama Jaya adalah menjabat sebagai General Manager;
- Bahwa saksi pernah mengurus masalah-masalah pajak atas nama Ibu Delia Murwihartini di PT. Rumindo Pratama Jaya;
- Bahwa saat sekarang PT. Rumindo Pratama itu sudah likuidasi baru dalam tahap pencabutan di PBB, dimana kewajiban-kewajiban PT. Rumindo Pratamasudah diselesaikan semua tagihan pajak terakhir kemarin di cek tinggal ada tagihan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas denda tidak lapor SPT dan untuk semua denda likuidasi sudah di selesaikan sekitar bulan Januari 2015 atas denda pokoknya yang saksi tidak hapal besarnya yang kurang lebih angkanya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian untuk sanksi administrasinya pada bulan Januari 2015 saksi ajukan keberatan pengurangan sanksinya di tingkat Kanwil namun seingat saksi pada bulan Februari 2015 ada keputusan dari Kanwil ada pengurangan saksi sekitar 1% (satu persen) dan setelah menerima putusan dari Kanwil saksi sudah menyelesaikan semua pembayaran atas sanksi administrasi tersebut;
- Bahwa nilai pajak yang dibayar terakhir untuk pajak Ibu Delia berupa Sanksi administrasi awal sekitar hampir Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Hal 75 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



lalu ada pengurangan dan saksi bayarkan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa selain itu ada pembayaran pajak terakhir di bulan Januari sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa selain pembayaran-pembayaran untuk badan hukum, KPP Bantul juga sering melakukan tuntutan-tuntutan mengenai kekurangan pajak sehingga menimbulkan sengketa di Pengadilan Pajak, antara lain di tahun 2009 ada pemeriksaan pajak atas PT. Rumindo Pratama atas tahun pajak tahun 2006 dan tahun 2007 kemudian hasil pemeriksaan KPP Bantul kemudian saksi mengajukan keberatan ke Kanwil yang hasilnya sebagian di terima dan sebagian di tolak dan yang ditolak tersebut saksi mewakili PT. Rumindo Pratama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak Jakarta dan baru selesai sekitar tahun 2013 dengan hasil 99% hasil banding PT. Rumindo Pratama diterima atau di menangkan;
- Bahwa setelah badan hukum ini menyelesaikan segala kewajiban ternyata secara pribadi Ibu Delia pada tahun 2014 juga disurati oleh KPP Bantul yang menanyakan tentang SPT Ibu Delia tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012;
- Bahwa seingat saksi ada satu surat tertanggal bulan Juni dan saksi baru terima bulan Agustus itu menanyakan bahwa ada perbedaan penambahan saham yang tidak disertai dengan persediaan kas di dalam laporan SPT tahun 2010 dan tahun 2011 kemudian untuk SPT 2012 ditanyakan ada penambahan aset berupa tanah tetapi tidak sebanding dengan pendapatan yang dilaporkan di SPT. Pada saat menerima surat tersebut diberikan keterangan untuk segera menghubungi yang bernama kalau tidak salah Ibu Herlina, lalu setelah saksi menghubungi Ibu Herlina saksi bertanya apa yang harus saksi siapkan karena kebetulan semua SPT itu saksi pribadi yang menyajikan lalu Ibu Herlina menyarankan untuk dilakukan pembetulan kalau memang ada yang salah namun jika kalau sudah sesuai SPT yang dilaporkan artinya ada kekurangan yang harus dibayarkan agar segera di bayarkan lalu saksi lakukan cek dan ternyata untuk penambahan saham ada kesalahan laporan di tahun 2010 bahkan di tahun 2009 karena ada pergantian pengurus ada satu dokumen terlewat tidak di tulis lalu saya lakukan pembetulan SPT tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 untuk yang SPT 2012, saksi melakukan penjelasan ke Ibu Herlina bahwa atas penambahan saham tersebut saksi lupa mencantumkan hutang Ibu Delia jadi pada saat ibu Delia membeli objek tanah senilai Rp.

Hal 76 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.650.000.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) beliau melakukan kredit di BCA senilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) saksi mencantumkan penambahan atas tanah tersebut tapi saksi lupa menambah catatan hutang pada SPT ibu Delia tahun 2012 lalu saksi diminta Ibu Herlina sajikan semua dokumen hutang lalu sudah saksi laporkan dan saksi cek di dokumen saksi di tanggal 21 Agustus 2014 saksi telah melakukan pembetulan SPT di tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. Dan untuk tahun 2012 sudah saksi sertakan dokumen kelengkapan;

- Bahwa sesudah pembetulan SPT pribadi dan pembayaran pajak-pajak Badan Hukum PT. Rumindo Pratama bulan Januari, di bulan Februari KPP kembali mulai mencari atau melibatkan Ibu Delia untuk menyelesaikan masalah pajak di tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012;
- Bahwa sekitar awal Februari yang saksi tidak ingat tanggalnya kebetulan Ibu Delia sedang pergi ke Eropa hari itu hari Jumat Pagi, saat itu Ibu Delia sudah terbang ke Jakarta untuk Ibu Delia terbang malam harinya ke Eropa selama 3(tiga) minggu, ada tamu dari Kantor Pajak mencari Ibu Delia karena saksi tidak merasa mempunyai wewenang atas Ibu Delia maka saksi tugaskan staf saksi mbak Yunita untuk menemui yang datang dari KPP Bantul saat itu seingat saksi Ibu Damaris dengan 2(dua) orang lainnya;
- Bahwa pada saat datang yang pertama Ibu Damaris menanyakan ke mbak Yunita ingin menyampaikan surat penting ke Ibu Delia lalu disampaikan bahwa Ibu Delia tidak ditempat karena ke Eropa, dan Ibu Damaris meminta bertemu dengan wakil dari Ibu Delia lalu kepada mbak Yunita di berikan surat yang masih di segel;
- Bahwa setelah KPP Bantul memberikan surat beberapa waktu kemudian KPP Bantul mendatangi Ibu Delia atau mencari Ibu Delia baik kerumah atau kekantor;
- Bahwa seingat saksi saat mbak Yunita menerima surat sekitar seminggu saksi minta mbak Yunita mengirimkan surat ke KPP Bantul menginformasikan bahwa surat KPP Bantul sudah diterima mbak Yunita tetapi sampai hari dikirim surat itu surat masih dalam keadaan tersegel karena tidak ada seorangpun yang mempunyai kewenangan membuka surat tersebut dan memberikan informasi kepada KPP Bantul bahwa Ibu Delia baru akan kembali ke Indonesia sekitar akhir Februari;

Hal 77 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- Bahwa sekembalinya Ibu Delia, saksi tahu Ibu Delia menunjuk Penggugat selaku kuasa hukumnya ke KPP dan juga saksi tahu bahwa ada perbincangan kalau Ibu Delia berhalangan hadir bisa mengirimkan kuasa, namun setahu saksi setelah Penggugat ke KPP Bantul, Penggugat di tolak oleh KPP Bantul akan tetapi penolakan tersebut tidak dilakukan secara resmi tertulis;
- Bahwa saksi pernah tahu selama Penggugat menangani di KPP Bantul, pihak KPP Bantul juga menghubungi saksi yang menyampaikan saksi walaupun bukan konsultan pajak sama seperti Penggugat saksi bisa juga menangani Ibu Delia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Wiwiek KPP Bantul, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya namun saksi pernah di telpon Bapak Sujatmoko untuk diundang menemui Ibu Wiwiek selaku Kepala KPP Bantul saat itu untuk diskusi mengenai pemeriksaan SPT Ibu Delia lalu saksi ke KPP Bantul, saksi bertemu Ibu Wiwiek, Bapak Sujatmoko dan Ibu Damaris, kemudian saksi berempat melakukan diskusi tentang proses pemeriksaan SPT Pribadi Ibu Delia tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 dan saat itu Ibu Wiwiek meminta saksi untuk yang pertama meminta Ibu Delia untuk mencabut kuasa kepada Penggugat dan yang ke dua jika dokumen-dokumen sudah siap supaya disajikan saja supaya pemeriksaan bisa dijalankan tetapi sekali lagi tanpa melibatkan penggugat, saat itu saksi menjawab kepada Ibu Wiwiek yang pertama saksi meminta kepada Ibu Wiwiek untuk kenapa tidak Ibu Wiwiek saja yang menjawab kepada Penggugat secara tertulis karena saksi tidak punya kewenangan dalam hal ini walaupun saksi bilang kepada pimpinan saksi semua juga menjadi otoritas pimpinan saksi untuk memutuskan, yang kedua walaupun dalam analisa dari pribadi saksi jika Ibu Delia mencabut kuasa Penggugat dalam pikiran saksi tidak semudah itu karena tentunya sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Ibu Delia dengan Penggugat jadi tidak segampang itu Ibu Delia bilang Penggugat mencabut kuasa Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Ibu Wiwiek bahwa prinsipnya dokumen-dokumen saksi yang menyimpan semuanya tergantung pada pimpinan saksi kalau pimpinan instruksikan kepada saksi maka akan saksi lakukan namun jika tidak saksi tidak, dan pada saat itu saksi beritahukan kepada Ibu Wiwiek karena yang ditunjuk adalah Penggugat sebagai kuasa maka saksi tidak berani melakukan action apapun karena nanti saksi

Hal 78 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



melanggar karena saksi tidak punya kewenangan dalam artian saksi tidak dikuasakan apapun;

- Bahwa selanjutnya saksi pernah dipanggil menemui Bapak Suratno KPP Bantul yang baru dan saat itu menyampaikan beliau menginginkan masalah ini cepat di selesaikan karena Penggugat di tolak dan tidak ada konsultan pajak yang mendampingi maka agar masalah ini cepat di selesaikan mohon dokumen segera di selesaikan, waktu itu yang saksi ingat beliau sampaikan kepada saksi "Mbak Nina saja siapkan dokumen bawa sini sudah selesai" kita periksa;
- Bahwa kemudian saksi bilang dengan Ibu Delia pimpinan saksi "Ibu kata Pak Ratno saksi saja tidak apa-apa untuk membawa semua dokumen kesana sudah lalu akan dilanjutkan pemeriksaan dan selesai" dan pimpinan saksi berkata "kan tidak bisa seperti itu mbak, mbaknya itu tidak punya ijin SK Konsultan dan segala macam terus apa bedanya? Dan saksi menjawab "maaf bu saksi tidak menanyakan kepada Pak Ratno tetapi saat itu pun saksi tidak mengiyakan karena saksi akan koordinasikan semuanya dengan Ibu Delia. Kemudian beberapa minggu saksi diminta datang dan saksi datang bersama Bapak Joyanda Silagan yang ditunjuk Ibu Delia sebagai konsultan pajak yang mendampingi, saksi sampaikan kepada Pak Ratno "mohon maaf bapak beberapa minggu yang lalu ketika saksi sowan bapak, bapak meminta saksi kenapa tidak saksi saja yang membawa dokumen lalu dilanjutkan pemeriksaan dan selesai lalu saksi bilang bahwa saksi berusaha untuk taat hukum dan saksi baca aturannya kalau Penggugat saja ditolak lalu siapa saksi jadi kan saksi tidak bisa, saksi hanya ingin meluruskan agar tidak salah paham. Saat itu Pak Ratno menjawab "ya sebenarnya tidak semudah itu artinya ketika saya meminta mbak Nina membawa dokumen kan bisa saja saat mbak Nina membawa dokumen Ibu Dela bisa telpon saya "Pak Ratno ini ada Ibu Nina yang saya percaya untuk membawa dokumen dokumen saya kepada bapak" beliau menjawab seperti itu;
- Bahwa saksi tahu dengan penolakan Penggugat tersebut menimbulkan kerugian dengan pekerjaan Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengurus PT. Rumindo sebagai pengacara Ibu Delia maupun perusahaannya selalu ada kontrak-kontrak kerja;
- Bahwa karena kontrak Ibu Delia dengan Penggugat dilakukan secara pribadi maka saksi tidak mempunyai kewenangan untuk tahu namun hanya dari

Hal 79 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



cerita Ibu Delia saksi mendengar bahwa ketika Ibu Delia batal kontrak otomatis Ibu tidak membayar semuanya;

- Bahwa saksi tidak mencari informasi mengenai alasan KPP Bantul menolak Penggugat namun saat itu yang saksi tangkap dari KPP Bantul sendiri menginginkan pemeriksaan pajak ini segera selesai dan mereka tahu semua dokumen ada di tangan saksi jadi saksi bisa menjadi kunci bahwa dokumen yang belum di lengkapi itu diinginkan maka tinggal saksi menyerahkan;
- Bahwa menurut info mbak Yunita KPP Bantul menginginkan ketemu langsung kepada Ibu Delia dan tidak mau di wakikan bahkan ketika telpon dengan Ibu Delia, ibu Delia cerita kepada saksi "mbak tadi orang KPP Bantul telpon saya katanya ketika ibu Delia belum mengatakan apapun dari KPP Bantul menyatakan bahwa "saya tidak mau menemui staf ibu, saya hanya bisa menemui Ibu atau orang yang Ibu kuasakan".
- Bahwa Ibu Delia bercerita bahwa tidak mungkin mengurus sendiri dan tidak mungkin menunjuk saksi maka Ibu Delia menunjuk Penggugat dan meminta saksi untuk membuat tanggapan kepada KPP Bantul yang dalam surat tersebut menyatakan Ibu Delia surat yang dikirim KPP Bantul sekitar 6 Februari dan tanggal 20 Februari sudah diterima tetapi baru hari ini pertanggal sekitar Senin baru bisa dibaca karena baru pulang dari Eropa karena baru sempat membaca maka Ibu Delia memerlukan waktu untuk tanggapan dan Ibu Delia telah menunjuk kuasa untuk mewakili guna mengurus semua permasalahan terkait pemeriksaan SPT dan kuasa tersebut akan datang ke KPP Bantul saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saksi merasakan ketika saksi mengurus beberapa pemeriksaan saksi mendapatkan beberapa intimidasi dari beberapa pegawai pajak jadi bisa jadi perlakuan ke Ibu Delia bertujuan apa tapi yang pasti perlakuan tidak menyenangkan;
- Bahwa saksi tahu dengan KPP Bantul yang mempersoalkan pajak tahun 2006 mengakibatkan Ibu Delia melikuidasi perusahaan bahkan sampai ganti KTP;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah dipanggil KPP Bantul yang pada saat itu Bapak Rudi bilang "Ibu cabut saja Kuasa Bapak Petrus nanti saya bantu pemeriksaannya";
- Bahwa Kewajiban perpajakan Ibu Delia apa yang saksi wakikan adalah masalah perpajakan untuk melaporkan SPT tahunan jadi saksi yang

Hal 80 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- membuat SPT tahunan dan saksi yang membayarkan dan saksi yang melaporkan SPT Tahunan ke KPP Bantul setiap tahunnya mulai tahun 2011;
- Bahwa perlakuan dari KPP bantul yang saksi maksud sangat meresahkan adalah yang pertama surat-surat yang dikirim kepada Ibu Delia ada satu surat pernyataan yang tidak enak yang menyatakan "saudara sebagai pengusaha yang cukup dikenal di Yogyakarta seharusnya menjadi contoh yang baik" yang bisa di artikan pimpinan saksi memberikan contoh yang tidak baik, lalu yang kedua ketika Ibu Delia mendapatkan telpon sepertinya memaksa harus ketemu sekarang juga;
 - Bahwa saksi bisa menjudge bahwa banyak perhitungan pajak dari KPP Bantul ini banyak yang salah karena bisa dilihat secara data dari tahun 1994 sampai tahun 2009 berarti saksi telah bekerja selama 8(delapan) tahun saksi melihat ada biaya pembelian majalah dicoret saksi tanya kenapa dicoret di jawab ini bisa saja untuk membeli majalah Gatra untuk Direktur, saksi langsung menjawab "Bapak ini biaya untuk majalah rajut majalah design yang saya pakai untuk produksi dan semua majalah ada di kantor saya, dan bisa di cek"., Dan kedua ada biaya operasional sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) saya tanya kenapa dijawab "ini untuk listrik pribadi dan saksi jawab ini listrik untuk pabrik yang memang atas namanya pribadi atas nama pemilik" dan yang lain yang saksi tahu saksi masih bisa beradu argumentasi.
 - Bahwa terkait penolakan ke Penggugat, saksi tidak menanyakan kepada pihak KPP, saat itu hanya diperlihatkan printout aturan dan di tunjukkan Penggugat tidak ada di poin poin tertentu dan saksi hanya memberi saran kepada Ibu Wiwiek untuk Penggugat diberikan penjelasan secara tertulis supaya jelas semua dan segera selesai permasalahan;
 - Bahwa yang bisa mewakili wajib pajak sesuai penjelasan KPP Bantul adalah kalau untuk perusahaan stafnya bisa mewakili, kalau untuk pribadi konsultan bisa yang telah memiliki SK Pajak dan untuk staf sendiri harus ada Sk Pajak;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat ini menjadi kuasa dari Ibu Delia sejak akhir Februari 2015;
 - Bahwa setelah Penggugat menjadi kuasa Ibu Delia, pada bulan Maret Penggugat datang ke KPP Bantul dan saat itu Penggugat melaporkan sudah bertemu ada Ibu Wiwiek dan tim pemeriksa sepuluh orang kemudian Penggugat menyatakan bahwa ini sepertinya Penggugat tidak bisa mewakili Ibu Delia tapi saat itu Penggugat tidak jelas ditolakny karena apa;

Hal 81 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



- Bahwa setahu saksi Penggugat ditolak mendampingi Ibu Delia dalam pengurusan permasalahan pajak di KPP Bantul dikarenakan, Penggugat tidak mempunyai ijin praktek konsultan pajak;
- Bahwa setahu saksi untuk saat ini kesimpulan pribadi saksi dikarenakan sepengetahuan yang saksi alami karena saat di KPP Bantul saksi sudah bersama dengan konsultan yang baru bisa di artikan Penggugat sudah tidak menjadi kuasa Ibu Delia;
- Bahwa setahu saksi menurut info Ibu Delia kontrak perjanjian kuasa antara Penggugat dengan ibu Delia kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YUNITA SUSIANA SULISTYOWATI :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Rumindo, dan saat ini bekerja sebagai staf penjualan di PT. Dowa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah menjadi Kuasa Hukum ibu Delia tetapi saksi tidak tahu sebagai kuasa untuk apa;
- Bahwa saksi di ceritai oleh Ibu Delia sewaktu Ibu Delia di periksa di KPP Bantul dan di wakili oleh Penggugat tapi Penggugat di tolak oleh KPP Bantul, namun saksi tidak tahu alasan KPP Bantul menolak Penggugat;
- Bahwa KPP Bantul pernah melakukan panggilan panggilan kepada Ibu Delia itu terkait SPT pribadi, dimana saksi pernah menerima surat dari KPP Bantul yang ditujukan kepada Ibu Delia secara pribadi;
- Bahwa yang membawa surat bernama Ibu Damaris, yang saat menyampaikan surat itu bilang bahwa sebenarnya surat itu harus diterima oleh Ibu Delia sendiri tetapi karena Ibu Delia tidak ditempat maka sewaktu Ibu Delia pulang diminta segera datang ke KPP Bantul tanpa diwakili;
- Bahwa untuk saat ini apakah ibu Delia menggunakan konsultan pajak atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di lain pihak untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, STTD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, selanjutnya diberi tanda bukti PT-1.
2. Fotokopi Buku "Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, selanjutnya diberi tanda bukti PT-2.
3. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), selanjutnya diberi tanda bukti PT-3.
4. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 229 tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti PT-4.
5. Fotokopi Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala KPP Pratama Bantul nomor S-346/PJ.011/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Data Konsultan Pajak, selanjutnya diberi tanda bukti PT-5.
6. Fotokopi Surat nomor S-086/PP.IKPI/IV/2015 ketua umum dan sekretaris umum Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perihal: permintaan keterangan, selanjutnya diberi tanda bukti PT-6.
7. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum **Pada Pengadilan Pajak**, selanjutnya diberi tanda bukti PT-7.
8. Fotokopi Surat Sekretaris Pengadilan Pajak nomor S-218/SP/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Penjelasan Tentang Izin Kuasa Hukum Atas Nama Saudara Petrus Bala Pattyona, SH.,MH., selanjutnya diberi tanda bukti PT-8.
9. Fotokopi Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 03/Rw 19 kelurahan Gamping, Ketua Rw 19 kelurahan Gamping, Lurah Desa Gamping dan Camat Gamping Patukan, selanjutnya diberi tanda bukti PT-9.
10. Fotokopi Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 007/Rw 039 kelurahan Sariharjo, Ketua Rw 039 kelurahan Sariharjo, Lurah Desa Sariharjo dan Camat Ngagilk, selanjutnya diberi tanda bukti PT-10.
11. Fotokopi Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan

Hal 83 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Kepada Ketua Rt 07 kelurahan Trirengo, Lurah Desa Trirengo dan Camat Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti PT-11.

12. Fotokopi Surat Nomor 021/PUTMS/PBP/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Menjadi Saksi Dalam Hal Jual Beli Tanah dan Bangunan Kepada Ketua Rt 07 kelurahan Maguwoharjo, Ketua Rw 55 kelurahan Maguwoharjo, Lurah Desa Maguwoharjo dan Camat Depok, selanjutnya diberi tanda bukti PT-12.

13. Fotokopi Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya diberi tanda bukti PT-13.

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-7, dan PT-13 yang merupakan foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 NOPEMBER 2016, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa karena tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, maka selanjutnya baik Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah memberikan jawaban seperti dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya yaitu mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*), *Eksepsi Disqualifikatoir* Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan Penggugat kurang

Hal 84 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



pihak (Plurium Litis Consortium) dan Eksepsi mengenai *Doli Prae Sintis* Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang diajukan secara licik;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Kuasa Para Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya mengajukan bantahan tertanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah untuk dan atas nama pribadi. Para tergugat sepertinya gagal memahami dan tidak paham bahwa gugatan penggugat adalah untuk diri pribadi penggugat sehingga tidak tepat para Tergugat menyatakan seolah-olah penggugat tidak ada kaitan dengan permasalahan klien penggugat_ Ny. Dra. Delia Murwihartini, padahal pada waktu penggugat mengurus masalah pajak klien penggugat tetapi ditolak oleh para tergugat.
2. Bahwa Penggugat memiliki hak dan kewajiban yang melibatkan dengan Wajib pajak Ny. Delia Murwihartini karena Penggugat pada tanggal 28 Februari telah mengirim surat ke KPP Bantul dan telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para Tergugat dalam rangka pemeriksaan kepatuhan pajak. Penggugat juga menjadi Kuasa Khusus Wajib Pajak;
3. Bahwa dalih para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan terhadap Para Tergugat selaku Pegawai Pajak dan pribadi tidak dapat digabung. Pendapat tersebut adalah keliru besar karena dengan jabatan selaku Pegawai pajak yang korup dan memperhatikan pribadi-pribadinya sebagai Pejabat Pajak yang korup menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi yaitu selalu menawarkan penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus dengan klien Penggugat agar masalah-masalah yang masih bersifat abu-abu (grey area) dapat diselesaikan dengan para Tergugat, sehingga status para Tergugat selaku Pegawai pajak tidak dapat dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menyalahgunakan jabatan-jabatan dan kewenangan yang ada padanya;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas bahwa Penggugat dalam gugatan ini bertindak selaku pribadi bukan selaku penerima Kuasa dari Wajib Pajak;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur adalah tidak benar karena identitas Penggugat jelas, demikian juga posita dan petitum juga jelas karena dasar gugatan Penggugat adalah ditolaknya Penggugat untuk mendampingi wajib pajak dan hal tersebut menimbulkan kerugian baik moril atau materiil;
6. Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak adalah sesat dan keliru karena untuk menggugat seseorang pilihannya ada pada Penggugat, karena apakah seseorang yang akan digugat telah melakukan

Hal 85 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



sesuatu perbuatan hukum yang merugikan Penggugat. Sepanjang hubungan hukum antara Penerima Kuasa, Wajib pajak Ny. Dra. Delia Murwihartini dan Penggugat selaku penerima Kuasa, Penggugat merasa tidak ada suatu perbuatan sekecil apapun yang merugikan Penggugat;

7. Bahwa gugatan Penggugat dilakukan dengan itikad baik, jujur dan sebagai suatu koreksi total atas penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan jabatan dan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, memeras para Wajib Pajak dan selalu mengajak Para Wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan yang abu-abu secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Para Tergugat maupun bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin A (mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, alasan pokok pengajuan gugatan oleh Penggugat oleh karena penggugat merasa dirugikan karena pernah terjadi penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, penggugat dalam surat gugatannya yaitu Posita poin 10, berkaitan pula dengan petitum poin 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bantul terhadap Penggugat selaku Kuasa Hukum Wajib pajak atas nama Ny. Delia Murwihartini, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menemukan uraian dalil-dalil Penggugat tersebut lebih cocok menempatkan para Tergugat tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan direktorat Jendral Pajak, karena memang pada dasarnya Para Tergugat adalah selaku Pejabat Administrasi oleh karenanya karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan administrasi yang semata-mata sebagai bentuk pelaksanaan perintah jabatan, dan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis tidak menemukan dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan tindakan-tindakan pribadi apa yang Para Tergugat telah lakukan sehingga Para Tergugat layak digugat secara pribadi;

Hal 86 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438-439, disebutkan bahwa kekeliruan menentukan pihak dalam Gugatan mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga dapat diajukan *exception in persona* dengan alasan kesalahan menempatkan kedudukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dapat disimpulkan adanya abstrak hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum atas gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*) dan gugatan gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977;

Dengan kaidah hukum: “ *Seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan*”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975;

Dengan kaidah hukum: “ *Oleh karena petitum gugatan tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan, dan oleh karena itu pula Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Para Tergugat pada poin 1 (satu) yaitu mengenai gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*) telah dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*) maka terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, untuk mempersingkat putusan ini akan diambil alih dan dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat secara formil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karenanya patut dan berdasar terhadap gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaart*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya pihak Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat secara formil dan oleh karenanya pokok perkara

Hal 88 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis berpendapat terhadap gugatan Rekonvensi dalam perkara ini secara *mutatis mutandis* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.109.000,- (satu juta seratus sembilan ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 oleh kami: ZAENAL ARIFIN, SH, MSi, MH selaku Hakim Ketua, KOKO RIYANTO, SH dan RR. ANDY NURVITA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal 89 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum dan EVI INSIYATI, SH, MH dan dibantu MUCHTOLIP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum

ZAENAL ARIFIN, SH, MSi, MH

EVI INSIYATI, SH, MH

Panitera Pengganti

MUCHTOLIP, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	99.000,-
3. Panggilan	Rp.	969.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.109.000,-

Hal 90 dari 90 Putusan Nomor 39./Pdt.G/2016/PN.Btl